



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKJIP

TAHUN 2024

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2024



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.2 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7
1.3 Data Pegawai	8
1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Sesuai Jabatan	9
2. Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil	9
3. Klasifikasi Golongan Pegawai Negeri Sipil	10
1.4 Sertifikat ASN	10
1.5 Cascading Kinerja (Keterhubungan dengan RPD)	12
1.6 Indikator Kinerja Utama (IKU)	15
1.7 Peta Proses Bisnis	16
1.8 Ringkasan Hasil Evaluasi	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
2.1 Rencana Strategis	18
2.2 Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024	18
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
1.1 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024	25
3.1.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	25
3.1.2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan 2 (dua) tahun terakhir	26
3.1.3. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah	27
3.1.4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi provinsi	30
3.1.5. Analisis atas Realisasi Kinerja Tahun 2024	32
1.2 Realisasi Anggaran	32
3.2.1. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Anggaran	32
3.2.2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	35
3.2.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia Tahun 2024	48
3.2.4. Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana	49
3.2.5. Upaya Perbaikan Kinerja	51
BAB IV PENUTUP	54



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Sesuai Jabatan	8
Tabel 1.2 Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil	9
Tabel 1.3 Klasifikasi Golongan Pegawai Negeri Sipil	9
Tabel 1.4 Sertifikat ASN pada tahun 2024	10
Tabel 1.5 IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2024	15
Tabel 1.6 Penilaian SAKIP	16
Tabel 2.1 Sasaran Strategis	18
Tabel 2.2 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran pada RPD dan RENSTRA 2024-2026	19
Tabel 2.3 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target	19
Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Tahun 2024	24
Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja	28
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Akhir RENSTRA	31
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Provinsi/Nasional	35
Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program Tahun 2024	42
Tabel 3.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024	45
Tabel 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia Tahun 2024	48
Tabel 3.8 Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana	49



BAB I PENDAHULUAN

LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang disusun sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang selama tahun 2024 sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah terhadap tingkatan kinerja yang dicapai. Tujuan penyusunan laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pengelolaan Pemerintahan Daerah telah mengalami dinamika perubahan nomenklatur Perangkat Daerah (PD) dan yang terakhir dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang menjadi dasar untuk menentukan arah kebijakan dalam perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan terencana sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang telah ditetapkan.

Adapun Arah kebijakan Renana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 yang hendak dicapai adalah: **“Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur Berkelanjutan yang mendorong Industry Agribisnis dan Pembangunan Wilayah”**.

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang, mempunyai sasaran yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan;
2. Terwujudnya penyediaan air yang cukup;
3. Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur;
4. Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang;
5. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah.



1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Jombang di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sedangkan dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Adapun pelaksanaan tugas yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain:

1. Perumusan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Pelaksanaan administrasi dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
6. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Sekretariat

Tugas Pokok:

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program dan evaluasi.

Fungsi, meliputi:

- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan serta pedoman operasional pelaksanaan dan evaluasi kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan, administrasi dan pengembangan pegawai, penyusunan rencana dan evaluasi program dan anggaran rumah tangga, serta penatakelolaan keuangan;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan, anggaran dan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang ;
- d. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan aparatur sipil negara;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta pelayanan publik;
- h. Pengelolaan aset;
- i. Pengelolaan kearsipan;



- j. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan data dan sistem informasi ;
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan strategis dan pelaksanaan program, kegiatan dan realisasi anggaran secara terukur dan berkelanjutan.
- l. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi dan koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU), Laporan Keuangan (LK), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkup Dinas;
- m. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan Publik (SPP);
- n. Pelaksanaan koordinasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi; dan
- o. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai Tugas:

- a. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional;
- b. Melaksanakan administrasi Kepegawaian, pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier;
- c. Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga, perjalanan dinas dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan;
- d. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan kantor;
- e. Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- f. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepastakaan;
- g. Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas;
- h. Membantu sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur;
- i. Menyusun Standart Pelayanan minimal; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;

(2) Sub Bagian Keuangan dan Aset

Mempunyai Tugas:

- a. Melaksanakan penatausahaan keuangan, meliputi pengelolaan anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi/ pembukuan, pertanggung-jawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- b. Melaksanakan pengurusan biaya perjalanan dinas, perpindahan pegawai dan ganti rugi, gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya;



- c. Menyusun, melaksanakan dan mempertanggungjawaban anggaran;
- d. Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barang-barang inventaris kantor;
- e. Melaksanakan penatausahaan, pengelolaan dan pelaporan aset;
- f. Melaksanakan peningkatan kesejahteraan Pegawai; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Bidang Bina Marga

Tugas Pokok yakni:

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bidang pemanfaatan, pengawasan, jalan dan jembatan, pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan.

Memiliki Fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan pra survei, survei dan perencanaan teknis struktur jalan dan jembatan;
- b. Pelaksanaan survei harga bahan, alat dan upah kerja sebagai pedoman penyusunan Harga Satuan Perkegiatan;
- c. Pelaksanaan pembangunan, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan dan pengembangan jaringan jalan dan jembatan beserta bangunan pelengkap;
- d. Penyusunan laporan tentang pelaksanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan dan pengembangan jaringan jalan dan jembatan beserta bangunan pelengkap;
- e. Pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan teknis di bidang jalan dan jembatan;
- f. Pelaksanaan pendataan dalam rangka pengembangan dan rehabilitasi jalan dan jembatan serta penyusunan legger jalan;
- g. Pelaksanaan pemutakhiran data kondisi, status fungsi jalan dan jembatan;
- h. Pelaksanaan perawatan dan perbaikan peralatan penunjang jalan ;
- i. Pelaksanaan operasional penunjang pembangunan dan pemeliharaan bidang Bina Marga;
- j. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta monitoring terhadap pemanfaatan jaringan jalan dan jembatan beserta bangunan pelengkap;
- k. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan aset pemerintahan daerah di bidang jalan kabupaten, jalan desa, dan jembatan;
- l. Pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan pohon pada jaringan jalan kabupaten dan jalan desa; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas.

3. Bidang Sumber Daya Air,

Memiliki Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dibidang perencanaan, pengendalian, rehabilitasi, pembangunan, operasional, dan pemeliharaan sumber daya air.

Memiliki Fungsi:

- a. Penyusunan petunjuk teknis kegiatan operasi dan pemeliharaan irigasi;
- b. Penyusunan dokumen pengelolaan irigasi di Kabupaten Jombang ;
- c. Pelaksanaan pembinaan kelompok pengelola irigasi;



- d. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air;
- e. Pembinaan kelompok pengelola irigasi;
- f. Penerbitan rekomendasi pemanfaatan aset, jaringan irigasi;
- g. Pelaksanaan inventarisasi jaringan irigasi kewenangan kabupaten;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pengawasan dan pengendalian fasilitas sumber daya air.
- i. Pelaksanaan pengendalian aset jaringan irigasi;
- j. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi peogram dan kegiatan perencanaan dan pengendalian sumber daya air;
- k. Pelaksanaan pegelolaan dan pemeliharaan pohon pada fasilitas sumber daya air; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas .

4. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, terdiri atas:

Memiliki Tugas Pokok:

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dibidang Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang serta pertanahan.

Memiliki Fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan recana program kerja bidang penataan ruang dan pertanahan ;
- b. Pelaksanaan penyusunan peraturan teknis dan/ atau pendukung pelaksanaan peraturan penataan ruang dan pertanahan;
- c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan, sosialisasi dan pengawasan penataan ruang dan pertanahan ;
- d. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama di bidang penataan ruang dan pertanahan;
- e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang penataan ruang dan pertanahan;
- f. Pelaksanaan penatausahaan,penatagunaan tanah dan fasilitasi permasalahan pertanahan ; dan
- g. Pelaksanan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

5. Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi

Mempunyai Tugas Pokok:

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dibidang penataan bangunan dan bina konstruksi.

Mempunyai Fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja bidang penataan bangunan dan bina konstruksi;
- b. Pelaksanaan penyusunan peraturan teknis dan/ atau pendukung pelaksanaan peraturan penataan bangunan dan bina konstruksi;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis dan kegiatan bidang penataan bangunan dan bina konstruksi;
- d. Penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan bidang penataan bangunan dan bina konstruksi;
- e. Pengkoordinasian dan fasilitasi kerjasama di bidang penataan bangunan dan bina konstruksi;



- f. Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang penataan bangunan dan bina konstruksi ;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan yang di berikan oleh Kepala Dinas;

Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan Bidang Bina Marga

1. Anggaran untuk pemeliharaan jalan dan jembatan tidak sebanding dengan jumlah ruas dan kerusakan yang ada.
2. Perubahan fungsi wilayah di beberapa lokasi menyebabkan meningkatnya LHR (Lalu Lintas Harian Rata-Rata) pada beberapa ruas
3. Kurangnya SDM dalam menangani proses pengadaan barang dan jasa melalui E-Purchasing (E- catalog) metode mini kompetisi.

Permasalahan Bidang Sumber Daya Air

1. Terbatasnya pasokan air dikarenakan tidak memiliki sumber air tersendiri di kabupaten Jombang
2. Tingkat kerusakan sarana dan prasarana irigasi masih cukup tinggi
3. Peralatan penunjang pelaksanaan urusan pekerjaan umum masih kurang
4. Konflik kepentingan pemanfaatan air irigasi masih sering terjadi
5. Pengembangan perencanaan terkait penanggulangan bencana di daerah belum memadai

Permasalahan di Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi

1. Tidak lengkapnya data bangunan gedung di Kabupaten Jombang
2. Data bangunan gedung dan PBG tidak terdokumentasi dengan baik
3. Dibutuhkan SDM Teknik Sipil, Teknik Arsitektur, dan Teknik Elektro (MEP)

Permasalahan di Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

1. Terdapat 2 kecamatan yang sudah memiliki RDTR namun muatannya belum mengacu pedoman terbaru dan belum terintegrasi dengan sistem OSS sehingga perlu penyesuaian kembali dengan pedoman terbaru;
2. Belum semua kecamatan di Kabupaten Jombang memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) digital yang terintegrasi dengan sistem OSS (Online Single Submission) sebagai acuan dalam penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) karena keterbatasan anggaran daerah;
3. Belum tersedia peraturan/keputusan terkait insentif dan disinsentif, pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan perangkat pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten;
4. Perlunya peningkatan pemahaman perangkat daerah dan masyarakat terhadap muatan rencana tata ruang (RTR) sehingga terjadi sinergitas antara pelaksanaan pembangunan daerah dengan rencana tata ruang wilayah yang telah disusun dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan oleh masyarakat, swasta maupun pemerintah.



1.2 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



1.3 Data Pegawai

1) Jumlah Pegawai Negeri Sipil Sesuai Jabatan

Pegawai/Aparatur Pemerintah merupakan elemen terpenting dalam sebuah organisasi. Pegawai/Aparatur Pemerintah memiliki peran strategis dan dominan pada pelaksanaan pemerintahan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang. Sebab tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang akan tercapai apabila didukung dengan aparatur yang handal dan profesional. Oleh sebab itu, manajemen sumber daya aparatur/manusia secara tepat dan terarah sangat dibutuhkan, sehingga pegawai/aparatur dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan efektifitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang.

Demi mewujudkan administrasi pemerintahan yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam urusan kebinamargaan sumber daya air, penataan ruang dan pertanahan, serta tata bangunan dan bina konstruksi, saat ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang didukung oleh 104 Aparatur Sipil Negara yang didukung dengan sertifikat kompetensi sehingga efisiensi pegawai dapat dilakukan.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Sesuai Jabatan

Jabatan	Satuan	Jumlah
Kepala Dinas	Orang	1
Sekretaris	Orang	1
Kepala Bidang	Orang	4
Pengendali kegiatan	Orang	10
Kepala Sub Bagian	Orang	1
Kepala UPTD	Orang	9
Staf	Orang	78
TOTAL	Orang	104

Dari tabel 1.1 maka dapat diketahui bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil yang sesuai dengan jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang pada Tahun 2024 total sebanyak 104 orang dengan rincian 1 Kepala Dinas dan 1 Sekretaris, 4 Kepala Bidang, 10 Pengendali kegiatan, 1 Kepala Sub Bagian, 9 Kepala UPTD serta 78 staf.

2) Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan Tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut;

Tabel 1.2
Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil

Pendidikan	PNS
SD	-
SLTP	3
SLTA	62
Diploma	3
Sarjana (S ₁)	32
Pasca Sarjana (S ₂)	4
Total	104

Dari tabel 1.2 maka dapat diketahui bahwa untuk tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang pada Tahun 2024 dengan tingkat pendidikan SLTP/SMP sebanyak 3 orang, untuk tingkat pendidikan SLTA sebanyak 62 orang, Diploma 3 orang serta untuk tingkat pendidikan Sarjana dan Pasca Sarjana sebanyak 32 dan 4 orang dengan total Pegawai Negeri Sipil sebanyak 104 orang.

3) Klasifikasi Golongan Pegawai Negeri Sipil

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan Pangkat/Golongan adalah sebagai berikut;

Tabel 1.3
Klasifikasi Golongan Pegawai Negeri Sipil

Klasifikasi Golongan	Jumlah	Klasifikasi Golongan	Jumlah	Klasifikasi Golongan	Jumlah	Klasifikasi Golongan	Jumlah
I/a	-	II/a	1	III/a	39	IV/a	5
I/b	-	II/b	7	III/b	6	IV/b	2
I/c	1	II/c	22	III/c	3	IV/c	
I/d	-	II/d	3	III/d	11	IV/d	
						IV/e	
P3K	4						
TOTAL							104

Dari tabel 1.3 dapat diketahui bahwa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang terdapat klasifikasi golongan diantaranya untuk golongan I sebanyak 1 orang, untuk golongan II sebanyak 33 orang, untuk golongan III sebanyak 59 orang sedangkan untuk golongan IV sebanyak 7 orang dan P3K 4 orang. Jadi jumlah keseluruhan pegawai dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebanyak 104 orang.

1.4 Sertifikat ASN

Tabel 1.4
Sertifikat ASN pada tahun 2024

Terdapat beberapa sertifikat di peroleh dari pelatihan yang telah diikuti oleh Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang, diantaranya:

No .	JENIS SERTIFIKAT	JUMLAH ASN	TAHUN
1	Webinar ASN Belajar Seri 2	1	2024
2	Webinar ASN Belajar Seri 3	4	2024
3	Webinar ASN Belajar Seri 4	5	2024
4	Webinar ASN Belajar Seri 5	16	2024
5	Webinar ASN Belajar Seri 6	16	2024
6	Webinar ASN Belajar Seri 7	27	2024
7	Webinar ASN Belajar Seri 8	28	2024
8	Webinar ASN Belajar Seri 9	27	2024
9	Webinar ASN Belajar Seri 10	28	2024
10	Webinar ASN Belajar Seri 11	20	2024
11	Webinar ASN Belajar Seri 12	11	2024
12	Webinar ASN Belajar Seri 13	17	2024
13	Webinar ASN Belajar Seri 14	15	2024
14	Webinar ASN Belajar Seri 15	24	2024
15	Webinar ASN Belajar Seri 16	17	2024
16	Webinar ASN Belajar Seri 17	9	2024
17	Webinar ASN Belajar Seri 18	21	2024
18	Webinar ASN Belajar Seri 19	11	2024
19	Webinar ASN Belajar Seri 20	26	2024
20	Webinar ASN Belajar Seri 21	35	2024
21	Webinar ASN Belajar Seri 22	33	2024
22	Webinar ASN Belajar Seri 23	29	2024
23	Webinar ASN Belajar Seri 24	37	2024
24	Webinar ASN Belajar Seri 25	29	2024
25	Webinar ASN Belajar Seri 26	38	2024
26	Webinar ASN Belajar Seri 27	28	2024
27	Webinar ASN Belajar Seri 28	33	2024
28	Webinar ASN Belajar Seri 29	23	2024
29	Webinar ASN Belajar Seri 30	27	2024
30	Webinar ASN Belajar Seri 31	34	2024
31	Webinar ASN Belajar Seri 32	28	2024
32	Webinar ASN Belajar Seri 33	34	2024
33	Webinar ASN Belajar Seri 34	27	2024
34	Webinar ASN Belajar Seri 35	25	2024
35	Webinar ASN Belajar Seri 36	26	2024
36	Webinar ASN Belajar Seri 37	10	2024

No .	JENIS SERTIFIKAT	JUMLAH ASN	TAHUN
37	Webinar ASN Belajar Seri 38	12	2024
38	Webinar ASN Belajar Seri 39	3	2024
39	Webinar ASN Belajar Seri 40	2	2024
40	Webinar ASN Belajar Seri 41	7	2024
41	Webinar ASN Belajar Seri 42	10	2024
42	Webinar ASN Belajar Seri 43	18	2024
43	Webinar ASN Belajar Seri 44	10	2024
44	Webinar ASN Belajar Seri 45	4	2024
45	Webinar ASN Belajar Seri 48	1	2024
46	Makin Cakap Digital	1	2024
47	Webinar Bina Konstruksi 2024	3	2024
48	Pelatihan Kompetensi PBJP untuk Pejabat Pengadaan Batch I Tahun 2024	3	2024
49	Seminar Jasa Konstruksi I	2	2024
50	Kajian Berkah pagi IKADI Sidoarjo	2	2024
51	Seminar Inovasi Arsitektur Betang Lebar	4	2024
52	Seminar Nasional IKA ITS 2024	1	2024
53	Serasi Episode 2	1	2024
54	Serasi Episode 6	1	2024
55	Serasi Episode 7	3	2024
56	Serasi Episode 8	3	2024
57	Serasi Episode 17	1	2024
58	Webinar Nasional ASN Juara	23	2024
59	Sosialisasi Peraturan Menteri PUPR	1	2024
60	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi SDM bagi Pengelola Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2024	5	2024
61	Webinar Mas ARA (Makin Antusias ASN Juara)	5	2024
62	Webinar Netralitas ASN	8	2024
63	Bimbingan Teknis e-Katalog Pekerjaan Konstruksi	2	2024
64	Analisis Tingkat Kerawanan Bencana Banjir Berbasis Kondisi Fisik Dasar dan Binaan	1	2024
65	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	2024
66	Sertifikat Kompetensi Metodologi Penelitian	1	
67	Sosialisasi dan Pembinaan Netralitas ASN dan Non ASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang	2	2024
68	Pelatihan Kompetensi PPK Tipe C model MOOC Batch 2 Tahun 2024	1	2024
69	Seminar Nasional Perancangan, Assement dan Perkuatan Struktur Untuk Mewujudkan Bangunan Tahan Gempa Sebagai Upaya Meminimalisir Risiko Bencana di Masyarakat	1	2024
70	Pelatihan Pelaksanaan Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi (jenjang 4)	1	2024

No .	JENIS SERTIFIKAT	JUMLAH ASN	TAHUN
71	Pelatihan Konvensi Hak Anak	1	2024
72	Workshop Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi	1	2024
73	Indeks Penilaian Peserta Pelatihan	2	2024
74	Workshop 1/2 hari	1	2024
75	Bimbingan Teknis Merencanakan Bagunan Gedung yang Andal dan Berkelanjutan	1	2024
76	Bimbingan Teknik Pemanfaatan dan Pengawasan Penataan Ruang	1	2024
77	Seminar Nasional	2	2024

1.5 Cascading Kinerja (Keterhubungan dengan RPD)

Tema pembangunan RPD Kabupaten Jombang tahun 2024-2026 yang hendak dicapai adalah: “Mewujudkan Jombang Unggul dan Berbudaya Berbasis Agribisnis”. Dengan tujuan RPD Meningkatkan daya saing dan pemerataan ekonomi melalui pemantapan kualitas infrastruktur berkelanjutan yang mendorong pengembangan agrobisnis dan sektor unggulan lainnya. Untuk mencapai tujuan RPD Kabupaten Jombang tahun 2024-2026 yaitu Meningkatkan daya saing dan pemerataan ekonomi melalui pemantapan kualitas infrastruktur berkelanjutan yang mendorong pengembangan agrobisnis dan sektor unggulan lainnya, maka pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang memiliki 5 sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan
2. Terwujudnya Penyediaan Air Irigasi yang Cukup
3. Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur bangunan gedung
4. Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang
5. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN / PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	Definisi Operasional: - Jalan kondisi baik adalah jalan yang permukaan perkerasannya rata, tidak bergelombang dan mayoritas tidak ada kerusakan permukaan. - Dalam penentuan target sebesar 70,97 % Menyesuaikan dengan Target pada Matrik Renstra Tahun 2024	Data survey dan laporan UPT PJJ	Bidang Bina Marga

			1. Pemeliharaan jalan Tahun 2024 diperkirakan tidak sebanding dengan jumlah kerusakan jalan yang terjadi. 2. Untuk Tahun 2024 fokus dominan pada pelebaran jalan. Formula: Jumlah panjang jalan dalam kondisi baik / Jumlah total panjang jalan x 100 %		
2	Terwujudnya penyediaan air irigasi yang cukup	Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian	Definisi Operasional: - Jumlah debit air di saluran irigasi yaitu rata-rata debit yang didapatkan dari pengukuran langsung pada bangunan ukur tiap-tiap saluran yang dilakukan oleh petugas OP. Pengukuran dilakukan sebanyak 2x dalam 1 hari yakni pukul 06.00 WIB dan 12.00 WIB. - Kebutuhan air irigasi merupakan kebutuhan air irigasi untuk lahan pertanian pada wilayah Kabupaten Jombang yang berasal pada dokumen Rencana Tata Tanam Global yang disusun sebelum musim tanam yang didasarkan pada awal musim hujan tahun berjalan. Formula: Perbandingan jumlah debit air saluran irigasi dengan jumlah kebutuhan air terhadap total areal pertanian x 100%	Dokumen RTTG dan Laporan UPT PSDA	Bidang Sumber Daya Air
3	Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur bangunan gedung	- Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi	Definisi Operasional: - Pelaku jasa konstruksi yang memenuhi kompetensi adalah peserta sertifikasi jasa konstruksi yang mendapat sertifikat kompetensi	Data inventarisasi bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruks	Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi

		kompetensi	Formula: - Jumlah peserta sertifikasi yang mendapatkan sertifikat kompetensi / Jumlah peserta yang mengikuti sertifikasi kompetensi x 100%	i	
		- Persentase bangunan gedung negara dan bangunan strategis yang telah memenuhi persyaratan teknis	Definisi Operasional: - Bangunan gedung negara dan/atau bangunan strategis yang memenuhi persyaratan teknis adalah bangunan gedung negara dan bangunan strategis yang memiliki dokumen teknis Formula: - Jumlah verifikasi bangunan gedung negara dan bangunan strategis / Jumlah permohonan verifikasi bangunan gedung negara dan bangunan strategis x 100%		
4	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Definisi Operasional: - Kesesuaian pemanfaatan ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR) yang berlaku. Formula: Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang sesuai ketentuan / Jumlah pengajuan permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang x 100%	Data pemanfaatan ruang bidang Tata Ruang dan Pertanahan	Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

5	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Definisi Operasional: AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Formula: Hasil evaluasi AKIP tahun - n	Hasil evaluasi SAKIP	Kepala Dinas PUPR
---	---	--------------------------------------	--	----------------------	-------------------

Dalam mewujudkan tujuan Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang memiliki lima sasaran tersebut diatas yang dapat mendukung tujuan RPD 2024-2026.

1.6 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 1.5
IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2024

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang didukung oleh 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang dan 2 (dua) UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan yang tersebar di beberapa wilayah kerja dan 6 (enam) UPT Pengelolaan Sumber Daya Air yang juga tersebar di beberapa wilayah kerja.

1.7 Peta Proses Bisnis

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang mempunyai empat (4) bidang yaitu Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, dan Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi, UPT PSDA, UPT BM, serta UPT Laboratorium. Berikut penggambaran peta proses bisnis dan turunannya untuk Dinas PUPR Kabupaten Jombang:



Gambar 4. 3 Proses Bisnis Level 1 Proses P.12 Peningkatan Daya Dukung Infrastruktur untuk Daya Saing

1.8 Ringkasan Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi pada tahun 2024 menunjukkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memperoleh nilai 77,31 atau predikat BB. Penilaian tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6
Penilaian SAKIP

No	Komponen	Bobot	Nilai 2023	Bobot	Nilai 2024
1	Perencanaan Kinerja	30%	26.04	30%	23.84
2	Pengukuran Kinerja	30%	25.42	30%	23.83
3	Pelaporan Kinerja	15%	7.54	15%	10.45
4	Evaluasi Kinerja	25%	22.50	25%	19.19
Nilai Hasil Evaluasi		100%	81.49	100%	77.31
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A (Memuaskan)		BB (Sangat Baik)

Uraian singkat atas hasil evaluasi adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja

- Kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi, namun berdasarkan hasil evaluasi lapangan diketahui bahwa hanya sebagian kecil pegawai yang terlibat dalam penyusunan perencanaan kinerja selain itu belum terdapat pemahaman akan perencanaan pada setiap individu yang dilakukan dengan semangat pemecahan masalah secara riil untuk mencapai tujuan organisasi.

b. Pengukuran Kinerja

- Pada komponen ini pengukuran dan evaluasi telah menjadi pertimbangan dalam perencanaan periode berikutnya, namun hasil evaluasi lapangan diketahui pengukuran kinerja organisasi belum sepenuhnya menjadi pertimbangan dalam mengukur kinerja individu, serta pemberian penghargaan dan sanksi hukum belum di atur dengan jelas dan terukur untuk dapat memberikan motivasi kepada pegawai secara adil

c. Pelaporan Kinerja

- Masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian yaitu pada hasil evaluasi internal yang belum dimanfaatkan secara optimal dalam perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja

d. Akuntabilitas kinerja Instansi

- Masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian yaitu hasil evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja belum dimanfaatkan secara maksimal untuk perbaikan dan peningkatan kinerja. Hal ini dapat dilihat dari capaian rata-rata kinerja yang lebih rendah dari tahun sebelumnya, dimana rata-rata capaian kinerja Tahun 2023 sebesar 85,00% dibanding dengan rata-rata capaian kinerja Tahun 2022 sebesar 87,01%. Serta kenaikan nilai SAKIP yang belum signifikan hanya sebesar 0,83 poin dari tahun sebelumnya, Tahun 2022 (80,66) menjadi 81,49 (Tahun 2023).

Berdasarkan hasil evaluasi di atas sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana kondisi di atas di rekomendasikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang, agar:

- Meningkatkan pemahaman pegawai melalui perlakuan “secara aktif” seluruh pegawai baik secara bersamaan ataupun berjenjang dalam merumuskan perencanaan mulai dari identifikasi masalah, penentuan kinerja, indikator kinerja hingga penetapan target organisasi sampai dengan level paling operasional.
- Meningkatkan kualitas pengukuran dan evaluasi kinerja dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan evaluasi untuk merencanakan periode selanjutnya. Selain itu, penting untuk memperhatikan kinerja organisasi di atasnya agar dapat diketahui apakah kinerja individu/Perangkat Daerah telah cukup menunjang kinerja organisasi di atasnya. Agar disusun mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi dengan mempertimbangkan hasil pengukuran kinerja.
- Melakukan internalisasi semangat perbaikan berkelanjutan kepada seluruh pegawai dan terus mengembangkan inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya yang ada. Proses tersebut dijelaskan pada laporan kinerja melalui proses analisis yang tepat sehingga dapat menjadi gambaran kondisi eksisting yang akurat sebagai bahan evaluasi dan dapat dirumuskan strategi perbaikan pada periode berikutnya.
- Memanfaatkan hasil evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja untuk perbaikan dan peningkatan kinerja tahun berikutnya yang dapat diwujudkan dalam perbaikan target kinerja dan penyesuaian anggaran dalam DPA serta penyesuaian aktivitas dalam Rencana Aksi yang mendukung pencapaian kinerja .

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Sebagaimana yang tertuang dalam RPD Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang.

Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Berikut Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk tahun 2024-2026 :

Tabel 2.1
Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran
1	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik
2	Terwujudnya penyediaan air yang cukup	Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian
3	Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur bangunan gedung	Persentase bangunan gedung negara dan bangunan strategis yang telah memenuhi persyaratan teknis
		Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi kompetensi
4	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang
5	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah

2.2 Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024

Berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyusun Rencana Kerja (Renja) dengan memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai sasaran strategis, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya.

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan

Tabel 2.2
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran pada RPD dan RENSTRA 2024-2026

TUJUAN RPD	Meningkatkan daya saing dan pemerataan ekonomi melalui pemantapan kualitas infrastruktur berkelanjutan yang mendorong pengembangan agrobisnis dan sektor unggulan lainnya
TUJUAN RENSTRA	Meningkatkatnya infrastruktur pendukung pemerataan pembangunan antar wilayah melalui kebinamargaan dan sumberdaya air
SASARAN STRATEGIS	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan
	Terwujudnya penyediaan air irigasi yang cukup
	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang
	Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur bangunan gedung
	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah

Dari tujuan tersebut ditetapkan sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target

NO .	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025
1	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	65.75 %	70.97 %	71,19%
2	Terwujudnya penyediaan air yang cukup	Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian	85.00 %	73.15 %	74.20%
3	Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur bangunan gedung	Persentase bangunan gedung negara dan bangunan strategis yang telah memenuhi persyaratan teknis	100 %	100 %	100 %
		Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi kompetensi	100 %	100 %	100 %
4	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	90 %	85 %	86 %
5	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80.01%	80.02%	80.03%

Pada tabel 2.3 dapat diketahui bahwa target sasaran pertama yaitu meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan, dengan indikator Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik pada Tahun 2024 sebesar 70.97 % diperoleh dari jumlah panjang Jalan dalam kondisi baik di bagi jumlah total panjang jalan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang x 100%, pada target sasaran kedua Terwujudnya Penyediaan Air irigasi yang Cukup dengan indikator Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian sebesar 73.15 % diperoleh dari perbandingan jumlah debit air saluran irigasi dengan jumlah kebutuhan air terhadap total areal pertanian x 100%.

Target sasaran ketiga yaitu meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur bangunan gedung dengan dua Indikator Kinerja yaitu, Pertama Persentase bangunan gedung negara dan bangunan strategis yang telah memenuhi persyaratan teknis sebesar 100% di peroleh dari jumlah verifikasi bangunan gedung negara dan bangunan strategis/jumlah permohonan verifikasi bangunan gedung negara dan bangunan strategis x 100%.` Kedua Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi kompetensi sebesar 100% yang diperoleh dari jumlah peserta sertifikasi yang mendapatkan sertifikat kompetensi /jumlah peserta yang mengikuti sertifikasi kompetensi x 100%.

Target Sasaran keempat yaitu Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan indikator Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang sebesar 86% yang di peroleh dari Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang sesuai ketentuan/Jumlah pengajuan permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang x 100%.

Target Sasaran kelima yaitu Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah, dengan Indikator Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah dengan target Tahun 2024 sebesar 80.02 yang di peroleh dari Hasil evaluasi AKIP.

PK P-APBD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 000.6.5.1/1490/415.18/2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BAYU PANCOROADI, S.T., M.T.**
Jabatan : **Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. Drs. Teguh Narutomo, MM., CRGP., CGCAE., CFrA.**
Jabatan : **Pj. Bupati Kabupaten Jombang**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jombang, 18 September 2024
PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Dilandatangani secara elektronik



BAYU PANCOROADI, ST., MT.
NIP. 197412092003121002

PIHAK KEDUA
Pj. Bupati Jombang

Ditandatangani secara elektronik

{td2}

Dr. Drs. TEGUH NARUTOMO, MM



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

KODE UNIT : 415.18

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN JOMBANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	71,27 %
2.	Terwujudnya penyediaan air irigasi yang cukup	Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian	73,15 %
3.	Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur bangunan gedung	Persentase bangunan gedung negara dan bangunan strategis yang telah memenuhi persyaratan teknis	100,00 %
		Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi kompetensi	100,00 %
4.	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	85,00 %
5.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah	(A) 80,02 %

			ketentuan		
7.	Terfasilitasinya permasalahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan yang di tindak lanjuti	100,00 %	2.123.108.100,00
8.	Tersedianya data aset tanah milik Pemda secara spasial untuk mendukung perencanaan tata ruang	Program Penatagunaan Tanah	Persentase bidang tanah yang menjadi data spasial yang di validasi	70,00 %	106.775.000,00
9.	Terlaksananya urusan penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Rata - rata Capaian Kinerja Aparatur	100,00 %	26.530.514.143,00
TOTAL ANGGARAN					190.176.088.428,00

Jombang, 18 September 2024
PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Ditandatangani secara elektronik



BAYU PANCORADI, ST., MT.
NIP. 197412092003121002

PIHAK KEDUA
Pj. Bupati Jombang

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Drs. TEGUH NARUTOMO, MM



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

KODE UNIT : 415.18

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

1.1 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024

Sesuai dengan Inpres No. 29 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah, untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Untuk menunjang keberhasilan tujuan RPD Kabupaten Jombang Tahun 2024 – 2026, pada tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang melaksanakan sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai yang telah di tetapkan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan. dalam rangka melakukan evaluasi kinerja atas pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka diperoleh hasil pengukuran kinerja sebagai berikut:

3.1.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Berikut perbandingan target sasaran strategis dan program dengan realisasi tahun 2024.

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	71,27%	63,63%	89,28%
	Program Penyelenggaraan jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	73,89%	74,75%	101,16%
		Persentase Jembatan dalam kondisi standar	30,32%	30,32%	100%
2	Terwujudnya penyediaan air yang cukup	Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian	73,15%	73,15%	100,00%
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian	68,13%	70,81%	103,94%
3	Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur bangunan gedung	Persentase bangunan gedung negara dan bangunan strategis yang telah memenuhi persyaratan teknis	100%	100%	100%
		Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi kompetensi	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung Negara yang telah di verifikasi	100%	100%	100%
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase penataan bangunan dan lingkungan strategis	100%	100%	100%
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase pelaku jasa konstruksi yang dibina	100%	100%	100%
4	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	85.00%	96,68%	113,74%
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%
	Program Penatagunaan Tanah	Persentase bidang tanah yang menjadi data spasial yang di validasi	70,00%	70,87%	101,24%
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan yang di tindak lanjuti	100%	100%	100%
5	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80,02%	77,31%	96,61%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Rata - rata Capaian Kinerja Aparatur	100%	100%	100%

Pada tabel 3.1 diatas dapat diketahui bahwa perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 sebagaimana yang ada pada tabel menunjukkan bahwa kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang pada sasaran strategis rata – rata telah tercapai sebesar 99,93%. Dari beberapa sasaran diatas, indikator Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik mempunyai capaian kinerja terendah yaitu 89,28%. Dari data laporan kerusakan jalan yang tercatat, dan laporan hasil inspeksi jalan atau survey kondisi jalan yang dilakukan secara berkala, hal ini terjadi karena tingkat kerusakan jalan disebabkan oleh besaran tonase melebihi kapasitas jalan, faktor ini dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti peningkatan volume kendaraan berat, atau infrastruktur jalan yang sudah usang dan perlu diperbaiki. perbaikan jalan mungkin mengalami keterlambatan karena faktor cuaca atau masalah administratif lainnya.

Bidang Sumber Daya Air pada Tahun 2024 pada sasaran strategis "Terwujudnya penyediaan air yang cukup" menunjukkan capaian 100% dari target 73,15%, yang dihitung melalui rasio luas lahan terairi sesuai kebutuhan terhadap total luas lahan pertanian. Hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan irigasi telah terpenuhi sesuai perencanaan.

Sementara itu, kinerja program "Pengelolaan Sumber Daya Air" mencatat capaian 103,94% dari target 68,13%, dengan realisasi sebesar 70,81%. Capaian ini dihitung berdasarkan penjumlahan lima pilar modernisasi irigasi, yaitu organisasi, personel, pembiayaan, sistem informasi, dan metode operasional yang direalisasikan pada pekerjaan di masing-masing sub kegiatan. Nilai yang melampaui target menunjukkan pelaksanaan program dan sub kegiatan berjalan sangat baik dan mendukung pencapaian sasaran strategis.

Meskipun kedua capaian menunjukkan hasil yang tinggi, perlu dicermati bahwa keselarasan antara indikator sasaran strategis dan indikator program belum optimal. Keduanya menggunakan pendekatan berbeda dalam mengukur keberhasilan, sehingga dapat menimbulkan bias dalam evaluasi kinerja menyeluruh. Rekomendasi perbaikan ke depan adalah menyelaraskan indikator sasaran dan program dengan mengutamakan **indikator hasil (outcome)** yang menggambarkan tingkat kecukupan dan keberlanjutan air irigasi secara lebih akurat. Hal ini penting agar pencapaian kinerja benar-benar mencerminkan peningkatan pelayanan publik di bidang sumber daya air.

Adapun indikator Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang memiliki capaian kinerja tertinggi yaitu sebesar 113,74%, dari data dari sistem aplikasi pemantauan tata ruang, laporan tentang jumlah permohonan yang diproses melalui sistem elektronik, dan analisis tren pertumbuhan permohonan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang. Hal ini terjadi karena adanya kemudahan akses terhadap layanan informasi tata ruang secara elektronik sehingga masyarakat dapat memastikan di awal terkait kesesuaian rencana kegiatan dengan rencana tata ruang. Kemudahan akses melalui platform digital memungkinkan masyarakat untuk memeriksa kesesuaian rencana kegiatan dengan rencana tata ruang dengan lebih cepat dan transparan. Ini mengarah pada peningkatan kepatuhan terhadap peraturan tata ruang yang berlaku, dan adanya upaya sosialisasi yang baik oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengenai pentingnya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan.

Dalam menganalisis perbandingan realisasi kinerja dengan target tahun 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang, kita dapat menggali beberapa aspek penting berdasarkan data yang telah disajikan dalam narasi dan tabel yang ada.

Beberapa faktor – faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja ini, baik untuk indikator yang memiliki capaian tinggi maupun rendah, Capaian kinerja yang rendah pada indikator panjang jalan dalam kondisi baik bisa saja dipengaruhi dari kerusakan jalan akibat beban tonase melebihi kapasitas jalan, oleh karena itu perlu adanya koordinasi dengan sektor / OPD lain untuk mengidentifikasi klafisikasi jalan, maka diperlukan evaluasi teknis jalan dan penegakan regulasi terhadap kendaraan bertonase tinggi untuk indikator jalan. Untuk capaian kinerja yang baik untuk mempertahankan capaian kinerja maka dilakukan perluasan digitalisasi layanan di indikator lain, mengingat manfaat besar pada

indikator tata ruang dan adanya inovasi digitalisasi layanan, seperti layanan informasi tata ruang secara elektronik sehingga masyarakat memiliki akses yang lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan informasi yang relevan sebelum melakukan pembangunan atau perizinan.

1.2 Rata-Rata Capaian Kinerja

Berdasarkan informasi yang diberikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang berhasil mencapai rata-rata kinerja sebesar **99,93%**. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, hampir semua sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk tahun 2024 dapat tercapai dengan baik. Angka ini menggambarkan performa yang sangat baik dan mendekati target yang diinginkan. Namun, ada indikator-indikator tertentu yang memerlukan perhatian khusus agar tidak menghambat keberhasilan keseluruhan.

3.1.2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan 2 (dua) tahun terakhir

Berikut perbandingan realisasi tahun ini dengan dua tahun sebelumnya;

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	71,27%	66,98%	65,75%	63,63%
	Program Penyelenggaraan jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	73,89%	73,70%	74,63%	74,75%
		Persentase Jembatan dalam kondisi standar	30,32%	30,64%	30,32%	30,32%
2	Terwujudnya penyediaan air yang cukup	Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian	73,15%	92,07%	88,60%	73,15%
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian	68,13%	81,78%	79,19%	70,81%
3	Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur	Persentase rekomendasi teknis IMB yang di tindaklanjuti	100%	100%	100%	100%
		Persentase pemenuhan SPM Bina Kontruksi	100%	100%	100%	100%
	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung Negara yang telah di verifikasi	100%	100%	100%	100%
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase penataan bangunan dan lingkungan strategis	100%	100%	100%	100%
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase pelaku jasa konstruksi yang dibina	100%	100%	100%	100%
4	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	85,00%	99,20%	95,19%	96,68%
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%	100%
	Program Penatagunaan Tanah	Prosentase bidang tanah yang menjadi data spasial yang di validasi	70,00%	56,48%	65,00%	70,87%
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan yang di tindak lanjuti	100%	100%	100%	100%
5	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80,02%	80,66%	81,49%	77,31%

No	Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Rata - rata Capaian Kinerja Aparatur	100%	100%	100%	100%

Pada tabel di atas dapat dilihat sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan terdapat penurunan capaian kinerja dari tahun 2022 ke tahun tahun 2024 di sebabkan tingkat kerusakan jalan yang disebabkan oleh besaran tonase melebihi kapasitas jalan, pada sasaran ke dua yaitu Terwujudnya penyediaan air yang cukup juga mengalami penurunan di sebabkan ada perbedaan formulasi pada tahun sebelumnya, pada sasaran ketiga Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur realisasinya sama yaitu 100%, pada sasaran keempat Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang juga mengalami kenaikan yaitu dari 95,00% menjadi 96,68% pada sasaran kelima yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah mengalami penurunan dari 81,49% menjadi 77,31%.

Meskipun ada penurunan dari beberapa sasaran, tetapi capaian kinerja pada program keseluruhan tercapai, dan dapat dilihat ada beberapa sasaran yang realisasinya tidak dapat diperbandingkan antara tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena adanya perubahan target dan formulasi.

❖ **Analisis Perbandingan Kinerja Antar Tahun**

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja program mengalami dinamika yang bervariasi antar sasaran. Perbandingan capaian antara tahun 2022 sampai 2024 pada sasaran pertama menunjukkan penurunan kinerja terjadi akibat kerusakan jalan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu tingkat kerusakan jalan tidak sebanding dengan besaran anggaran, tonase kendaraan yang berlebihan sehingga menyebabkan kerusakan jalan, hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap beban kendaraan dan belum optimalnya sistem pengendalian lalu lintas dan infrastruktur jalan. Perbandingan realisasi pada sasaran kedua bidang sumber daya air dapat dilakukan analisa sebagai berikut realisasi capaian sasaran strategis “Terwujudnya penyediaan air yang cukup” menunjukkan tren penurunan dalam tiga tahun terakhir, yaitu sebesar 92,07% pada tahun 2022, turun menjadi 88,60% di tahun 2023, dan menurun signifikan menjadi 73,15% pada tahun 2024. Demikian pula, kinerja program Pengelolaan Sumber Daya Air mengalami penurunan dari 81,78% pada 2022, menjadi 79,19% pada 2023, dan 70,81% pada 2024.

Jika dilihat sekilas, tren ini mengindikasikan penurunan kinerja. Namun, perlu dicermati bahwa pada tahun 2024 terjadi perubahan pada formulasi indikator kinerja program, sehingga target dan realisasi yang dihasilkan tidak dapat langsung dibandingkan secara linier dengan tahun-tahun sebelumnya. Formulasi baru yang digunakan lebih

kompleks dan menekankan aspek kualitas lima pilar modernisasi irigasi, yang berdampak pada turunnya nilai capaian meskipun secara teknis kegiatan tetap berjalan baik.

Selain itu, penetapan target tahunan tidak didasarkan pada hasil evaluasi tahun sebelumnya (tahun $n-1$), sehingga terjadi ketidaksesuaian antara target dan potensi realisasi. Ketidaktepatan ini menyebabkan tampilan data antar tahun terlihat menurun, padahal terdapat faktor metodologis yang memengaruhi perbedaan tersebut.

Ke depan, penetapan target kinerja perlu lebih mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya dan memperhatikan perubahan metode pengukuran. Dengan demikian, tren kinerja yang disajikan lebih menggambarkan kondisi riil dan memudahkan dalam melakukan evaluasi kinerja yang berkelanjutan.

Sasaran ketiga meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur, stabil dengan capaian 100% dalam 3 tahun terakhir, serta menunjukkan kinerja yang konsisten dan efektif dalam pelaksanaan program pada sektor ini adapun faktor pendukung tingkat kestabilan capaian yaitu Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada berbagai pelayanan publik, Adanya Aplikasi SIMBG yang terintegrasi dengan kementerian PUPR, Adanya kerjasama dan komunikasi yang baik dari berbagai stake holder pada kegiatan Tata Bangunan dan Bina Konstruksi. Serta pada sasaran keempat terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang menunjukkan kondisi yang fluktuatif pada realisasi tahun 2022 sampai 2024. Hal ini sangat mungkin terjadi karena perolehan nilai tergantung dari jumlah permohonan rekomendasi tata ruang, dimana terdapat permohonan yang peruntukannya sesuai atau tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. Adapun faktor pendukung pencapaian sasaran tersebut yaitu adanya kemudahan akses layanan informasi tata ruang secara elektronik yang memungkinkan pengguna untuk memastikan sejak awal kesesuaian rencana kegiatannya dengan rencana tata ruang yang berlaku. Sedangkan, faktor penghambatnya yaitu minimnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam rencana tata ruang. Dan yang terakhir yaitu sasaran kelima Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, mengalami fluktuasi dari 80,66%, sampai akhir 2024 mencapai 77,31%, hal ini mencerminkan masih terdapat tantangan dalam aspek tata kelola, transparansi, serta pelaksanaan evaluasi kinerja internal belum sepenuhnya dapat tertuang dan terukur dalam implementasi sistem akuntabilitas kinerja, hal ini disebabkan oleh sebagian besar SDM masih rendah dan perlu adanya monitoring berkala terhadap pemahaman, pengimplemension keterkaitan evaluasi SAKIP.

Dari tabel di atas dapat dilihat, secara umum kinerja program secara telah tercapai, meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa indikator sasaran. Pola ini mengindikasikan bahwa terdapat kemajuan di beberapa sektor strategis, seperti tata ruang dan infrastruktur pendukung. Namun di sisi lain, kinerja cenderung stagnan atau menurun pada sektor pelayanan dasar seperti jalan dan sumber daya air, yang disebabkan oleh tantangan eksternal dan teknis, serta perubahan pendekatan pengukuran.

3.1.3. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah

Untuk mengetahui tingkat kemajuan target yang telah ditetapkan dalam RPD, maka dapat diketahui realisasi sampai dengan tahun 2024 ;

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra

No	Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	71,41%	63,63%	89,28%
	Program Penyelenggaraan jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	72,80%	74,75%	102,68%
		Persentase Jembatan dalam kondisi standar	30,48%	30,32%	99,47%
2	Terwujudnya penyediaan air yang cukup	Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian	75,25%	73,15%	97,21%

No	Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian	74,95%	70,81%	94,48%
3	Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur	Persentase bangunan gedung negara dan bangunan strategis yang telah memenuhi persyaratan teknis	100%	100%	100,00 %
		Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi kompetensi	100%	100%	100,00 %
	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung Negara yang telah di verifikasi	100%	100%	100,00%
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase penataan bangunan dan lingkungan strategis	100%	100%	100,00%
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase pelaku jasa konstruksi yang dibina	100%	100%	100,00%
4	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	90,00%	96,68%	107,42 %
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100,00%
	Program Penatagunaan Tanah	Prosentase bidang tanah yang menjadi data spasial yang di validasi	80,00%	70,87%	88,59%
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan yang di tindak lanjuti	100%	100%	100,00%
5	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80,04%	77,31%	96,61%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Rata - rata Capaian Kinerja Aparatur	100%	100%	100,00%

Pada akhir RPD 2024-2026 di harapkan realisasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada akhir periode, bahkan ada beberapa sasaran yang realisasinya melebihi dari target akhir periode RPD yang di tetapkan yaitu pada sasaran Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang yaitu sebesar 107,42%,. Sehingga dapat dilihat bahwa Dinas pekerjaan Umum dan penataan Ruang sudah menyelesaikan realisasi kinerja sesuai dengan target yang telah di tetapkan, yang berarti mayoritas sasaran telah mendekati atau memenuhi target jangka menengah.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kondisi Kinerja

Berdasarkan uraian dan analisis di atas, secara umum terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi kondisi capaian kinerja:

a. Faktor Teknis

Overload tonase kendaraan yang merusak jalan menunjukkan perlunya penguatan regulasi dan infrastruktur pengendalian beban, kerusakan fisik dan cuaca juga berpotensi menjadi faktor teknis eksternal yang mempercepat degradasi infrastruktur.

b. Faktor Metodologis

Perbedaan formulasi capaian menyebabkan tidak konsistennya data perbandingan tahunan, sehingga evaluasi efektivitas menjadi sulit dilakukan, ini menandakan pentingnya standarisasi indikator dan sistem pengukuran kinerja dari tahun ke tahun.

c. Faktor Manajerial dan Tata Kelola

Penurunan akuntabilitas perangkat daerah menunjukkan adanya tantangan dalam sistem evaluasi internal, pelaporan kinerja, dan penerapan reward and punishment.

d. Faktor Kebijakan

Perubahan target atau indikator dari tahun ke tahun dapat disebabkan oleh penyesuaian kebijakan strategis nasional atau daerah yang berdampak pada kontinuitas capaian kinerja.

Tidak ada GAP negatif signifikan yang teridentifikasi. Sebaliknya, terdapat GAP positif yang menunjukkan bahwa realisasi saat ini lebih cepat dan lebih tinggi dibandingkan target akhir periode. Dalam upaya untuk memperbaiki atau mempercepat pencapaian target jangka menengah, walaupun mayoritas capaian sudah sesuai atau melampaui target, beberapa upaya berikut tetap perlu dilakukan untuk memastikan semua sasaran strategis dicapai secara berkelanjutan dengan melakukan:

1. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi, untuk memudahkan pekerjaan secara real time sehingga mengalami peningkatan efisiensi pengawasan dan perencanaan.
2. Peningkatan Kapasitas SDM, melaksanakan pelatihan teknis dan manajerial kepada pegawai untuk memperkuat kompetensi di bidang infrastruktur dan tata ruang.
3. Penguatan Koordinasi Antar Perangkat Daerah, dengan membentuk forum teknis terpadu antara dinas terkait (Lingkungan Hidup, Perhubungan, Bappeda, dll) agar perencanaan dan pelaksanaan terintegrasi.
4. Pengelolaan Risiko Pembangunan, menerapkan sistem early warning untuk deteksi dini terhadap potensi keterlambatan proyek atau kendala lapangan.
5. Transparansi dan Akuntabilitas Publik, mendorong partisipasi publik dalam perencanaan ruang dan pengawasan proyek melalui kanal digital atau forum masyarakat.

Realisasi kinerja Dinas PUPR Kabupaten Jombang pada tahun 2024 menunjukkan kemajuan signifikan dan bahkan melampaui target jangka menengah pada beberapa sasaran strategis. Capaian ini menjadi indikator bahwa program dan kebijakan yang diterapkan cukup efektif. Namun konsistensi, monitoring ketat, serta antisipasi terhadap risiko masih perlu dijaga agar keseluruhan target RPD 2024–2026 dapat tercapai tepat waktu dan berkelanjutan.

3.1.4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi provinsi

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Provinsi/Nasional

No	Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Provinsi/Nasional tahun 2024	Keterangan
1	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	63,63%	94,20%	Perbandingan Jalan Baik Kabupaten Jombang dengan Jalan Mantap (Baik + Sedang) Nasional Tahun 2024
	Program Penyelenggaraan jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	74,75%	66,66 %	Perbandingan capaian jalan dalam kondisi mantap dengan Kabupaten Mojokerto
		Persentase Jembatan dalam kondisi standar	30,32%		
2	Terwujudnya Penyediaan Air Yang Cukup	Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian	73,15%	86,95%	Perbandingan dengan realisasi provinsi dan Kabupaten
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian	70,81%		
3	Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung Negara dan Bangunan Strategis yang telah memenuhi persyaratan teknis	100%		Untuk Proses Perizinan Penerbitan PBG, Kab. Jombang peringkat 1 di Provinsi Jawa Timur dan Peringkat 9 Nasional dengan Kabupaten/Kota lainnya
		Presentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi kompetensi	100%		
	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan negara yang telah diverifikasi	100%		
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase penataan bangunan dan lingkungan strategis	100%		
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase pelaku jasa konstruksi yang dibina	100%		
4	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	96,68%		Untuk Proses Perizinan Penerbitan KKPR, Kab. Jombang Peringkat 2 di Provinsi Jawa Timur dan Peringkat 5 Nasional
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan	100%		

No	Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Provinsi/Nasional tahun 2024	Keterangan
5	Program Penatagunaan Tanah	Prosentase bidang tanah yang menjadi data spasial yang di validasi	70,87%		
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan yang di tindak lanjuti	100%		
	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah	77,31%	77,80%	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Rata - rata Capaian Kinerja Aparatur	100%		

Perbandingan realisasi kinerja Perangkat Daerah tahun 2024 dengan realisasi kinerja tingkat Provinsi telah dilakukan sebagaimana tercantum dalam tabel sebelumnya. Beberapa indikator kinerja Perangkat Daerah menunjukkan capaian yang melebihi realisasi rata-rata di tingkat Provinsi. Hal ini mencerminkan adanya potensi keunggulan spesifik yang telah dikembangkan oleh Perangkat Daerah dalam pelaksanaan programnya. Namun ditemukan pada indikator yang sama yaitu "Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah" pada instansi sejenis yang realisasinya diatas perolehan Dinas PUPR.

3.1.5. Analisis atas Realisasi Kinerja Tahun 2024

Untuk mewujudkan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024. Berikut ini identifikasi penyebab keberhasilan dan kegagalan Program Kegiatan selama Tahun 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang:

a. Bidang Bina Marga

Tercapainya target sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Jombang ditunjang oleh satu kegiatan yakni Pemeliharaan jalan Kabupaten/ Kota (pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan jalan dan rehabilitasi jembatan). Berikut faktor-faktor pendukung keberhasilan dan kegagalan tercapainya kinerja bidang Binamarga

Faktor-faktor pendukung keberhasilan:

- Perencanaan penanganan berdasarkan tingkat kerusakan jalan dan jembatan sesuai hasil survey dan usulan masyarakat (musrenbang) sehingga penanganan bisa cepat dan tepat sasaran.
- Penyediaan sarana dan prasarana yang cukup (coldmix dan aspal drum) serta personil lapangan yang memadai (tenaga URC dan UPT PJJ yang mumpuni) sehingga tepat dalam proses penanganan.

- Pengendalian pelaksanaan pekerjaan konstruksi (monev) di lakukan secara berkala dari segi kuantitas maupun kualitas sehingga pekerjaan berjalan sesuai rencana.

Faktor-faktor penghambat keberhasilan:

- Tingkat kerusakan jalan tidak sebanding dengan besaran anggaran
- Tonase kendaraan yang berlebihan sehingga mempercepat kerusakan jalan

Target jangka menengah sasaran strategis "Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan" telah menunjukkan kemajuan signifikan, meskipun belum disebutkan capaian kuantitatifnya, namun disampaikan bahwa Target jangka menengah sedang dikejar melalui program inti yaitu *pemeliharaan jalan kabupaten/kota*. Dan pelaksanaan kegiatan seperti rehabilitasi, peningkatan jalan dan jembatan berperan besar dalam mendekatkan atau mencapai target jangka menengah tersebut.

Dengan capaian tahun-tahun sebelumnya kualitas pelayanan jalan menurun dari 2023 ke 2024 karena tingginya tingkat kerusakan jalan akibat kendaraan bertonase tinggi, namun, tahun ini terlihat ada pemulihan kinerja melalui optimalisasi pemeliharaan jalan, memperlihatkan respons adaptif terhadap masalah tahun lalu.

Perbandingan praktik dari Kabupaten lain seperti kabupaten Semarang, dimana penerapan e-maintenance system untuk pelaporan kerusakan secara real-time dari warga. Kinerja sektor jalan dan jembatan di Kabupaten Jombang menunjukkan perbaikan setelah penurunan tahun lalu, didukung oleh perencanaan responsif, kesiapan sarpras, dan monev rutin, dan aplikasi pengaduan/pelaporan terkait kerusakan jalan, beberapa sasaran sudah melebihi target jangka menengah, menandakan keberhasilan strategi yang dijalankan. Namun, masalah struktural seperti tonase berlebih dan minimnya anggaran masih menjadi penghambat utama, langkah-langkah inovatif dan adaptif perlu terus dikembangkan, serta benchmarking dengan daerah lain bisa menjadi rujukan untuk mempercepat pencapaian target RPD 2024–2026 secara menyeluruh.

b. Bidang Sumber Daya Air

Pada tahun 2024, realisasi sasaran strategis “Terwujudnya penyediaan air yang cukup” pada Dinas PUPR Kabupaten Jombang tercapai sebesar 73,15%, sementara pada Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur mencapai 86,95%. Perbedaan capaian ini menunjukkan adanya selisih sebesar 13,8%, yang mencerminkan masih terdapat ruang peningkatan dalam pencapaian sasaran strategis di tingkat kabupaten.

Faktor yang kemungkinan mempengaruhi capaian di Jombang antara lain keterbatasan anggaran, skala kewenangan infrastruktur, dan tantangan teknis di lapangan. Sebaliknya, provinsi memiliki cakupan program lebih luas, dukungan anggaran lebih besar, dan kapasitas kelembagaan yang relatif lebih kuat.

Meski demikian, capaian 73,15% tetap menunjukkan kinerja yang cukup baik dan menjadi dasar evaluasi untuk peningkatan perencanaan, sinergi antarinstansi, serta penguatan pengelolaan sumber daya air di masa mendatang. Perlu upaya kolaboratif antara pemerintah kabupaten dan provinsi guna menyelaraskan target dan mempercepat pemenuhan kebutuhan air secara merata dan berkelanjutan.

Keberhasilan bidang Sumber Daya Air, didukung oleh beberapa hal diantaranya sebagai berikut :

- Adanya kegiatan pemeliharaan rutin yg bertujuan menjaga fungsi dan kondisi jaringan irigasi dalam kondisi baik.
- Adanya operator alat berat yang terampil
- Adanya staf alat berat yang memiliki keahlian dalam perbaikan alat berat sehingga kondisi alat berat dalam keadaan baik dan prima.
- Adanya koordinasi yg baik diantara pengelola irigasi (Dinas dan HIPPA/ GHIPPA) terutama pada saat pembagian air maupun pemeliharaan jaringan irigasi yg bersifat ringan.
- Adanya tenaga lapangan yang handal dalam melaksanakan tugas, baik itu pada saat musim kemarau (pembagian air) maupun musim penghujan (kondisi banjir).

Adapun kemungkinan tidak tercapainya target disebabkan oleh hal-hal berikut:

- Terjadinya bencana hidrometeorologi (seperti banjir) yang merusak prasarana jaringan irigasi
- Banyaknya proposal yang diterima namun jumlah alat berat yang tersedia terbatas

❖ **Kompilasi dan Penajaman Analisis Kinerja**

Perbandingan dengan Target Jangka Menengah (RPD 2024–2026):

- Realisasi kinerja bidang SDA menunjukkan arah pencapaian yang positif, berkat efektivitas pemeliharaan dan koordinasi pengelolaan air.
- Jika tren ini konsisten, target jangka menengah seperti peningkatan cakupan dan efisiensi layanan irigasi dapat dicapai bahkan lebih awal.

Perbandingan dengan Tahun-Tahun Sebelumnya:

- Tahun sebelumnya kemungkinan mengalami tantangan banjir dan keterlambatan pemeliharaan, sehingga:
 - Capaian kinerja tahun ini menunjukkan perbaikan nyata, utamanya pada kesiapan alat berat dan keterlibatan masyarakat.
 - Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sekarang terlihat peningkatan efisiensi dan respon lebih cepat terhadap kondisi lapangan.

Sebagai bahan pembelajaran untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang dari Kabupaten Klaten dengan melakukan praktik Aplikasi *Irigasi Pintar* untuk

pelaporan kerusakan saluran oleh petani secara online. Kedepannya akan melaksanakan penguatan sistem deteksi dini dan pelaporan cepat terhadap kerusakan irigasi. Serta penambahan alat berat bisa diganti sementara dengan pola kerja sama antarwilayah atau leasing alat berat saat puncak musim kerja dan digitalisasi koordinasi dan pelaporan.

c. Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi :

Keberhasilan kinerja di bidang Tata bangunan dan Bina Konstruksi di dukung oleh beberapa hal di antaranya adalah;

- Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada berbagai pelayanan publik.
- Adanya Aplikasi SIMBG yang terintegrasi dengan kementrian PUPR.
- Adanya kerjasama dan komunikasi yang baik dari berbagai stake holder pada kegiatan Tata Bangunan dan Bina Konstruksi.

Adapun beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam keberhasilan yaitu;

- Kurangnya sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dibidang teknik
- Adanya kebijakan pusat yang berubah-ubah membuat pelayanan terhambat

❖ Kompilasi dan Penajaman Hasil Analisis

Perbandingan dengan Target Jangka Menengah (RPD 2024–2026):

Arah kinerja saat ini selaras dengan target RPD, khususnya dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan perizinan bangunan dan digitalisasi sistem pengawasan dan pembinaan konstruksi.

Perbandingan dengan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya:

- Sebelum penggunaan SIMBG, proses perizinan bangunan berlangsung manual dan lambat, sering menyebabkan keterlambatan dan komplain masyarakat.
- Tahun ini, dengan SIMBG dan SOP, kecepatan dan akurasi pelayanan meningkat, ada lompatan kualitas signifikan dibanding 2–3 tahun sebelumnya.
- Kerja sama dengan stakeholder juga lebih kuat sekarang, terbukti dengan partisipasi asosiasi konstruksi dalam sosialisasi dan pengawasan.

Sebagai perbandingan dari Kabupaten/Kota lainnya, yaitu Kota Bandung melakukan program pelatihan teknis untuk SDM bidang perizinan bangunan dan sertifikasi mandiri , sebagai pembelajaran kedepannya di Kabupaten Jombang bisa melakukan pelatihan sertifikasi teknis bagi ASN agar adaptif terhadap perubahan regulasi nasional, Kemitraan dengan perguruan tinggi dan asosiasi profesional dan Pemanfaatan teknologi pengawasan bangunan dan aplikasi pelaporan mandiri.

d. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

Keberhasilan kinerja di bidang Tata Ruang dan Pertanahan di dukung beberapa hal di antaranya adalah;

- Adanya kemudahan akses layanan informasi tata ruang secara elektronik memungkinkan pengguna untuk memastikan sejak awal kesesuaian rencana kegiatannya dengan rencana tata ruang yang berlaku. Dengan demikian, permohonan yang tidak sesuai rencana tata ruang dapat diminimalkan, sehingga pemanfaatan ruang lebih optimal dan selaras dengan perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan.
- Terbangunnya komunikasi dan koordinasi yang baik antara stakeholder, baik dari perangkat daerah terkait maupun dengan penerima layanan dalam rangka fasilitasi layanan di bidang Tata Ruang.
- Terlaksananya layanan Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) secara online melalui bit.ly/tarujombang sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam mengajukan maupun memantau proses layanan KRK yang sedang di ajukan
- Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penataan ruang melalui pembinaan penataan ruang seperti pelatihan, bimbingan teknis, workshop, webinar

Adapun beberapa faktor penghambat yaitu:

- Kurangnya sumber daya manusia yang dapat melaksanakan monitoring rekomendasi pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan
- Perubahan regulasi sehingga tidak jarang menyebabkan keterlambatan dalam menyelenggarakan pelayanan karena perlu peyesuaian dengan regulasi terbaru

❖ Kompilasi dan Penajaman Hasil Analisis

Perbandingan dengan Target Jangka Menengah (RPD 2024–2026)

Target RPD 2026 peningkatan akurasi pemanfaatan ruang sesuai RTRW dan RDTR, digitalisasi layanan, serta keterpaduan lintas sektor dalam pengendalian ruang. Untuk capaian saat ini telah tersedia layanan informasi digital KRK dapat diakses online dan Koordinasi berjalan baik.

Perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya

Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dimana penyusunan RTRW dan RDTR banyak layanan dilakukan manual di tahun ini capaian pelayanan lebih cepat dan transparan, digitalisasi serta layanan daring lancar, pengatan regulasi dan monitoring SDM.

Sebagai perbandingan dengan Kabupaten/Kota lainnya seperti Kota Tangerang yang sudah menggunakan pelayanan KRK online lengkap dengan fitur konsultasi virtual dan peta interaktif maka untuk kedepannya Kabupaten Jombang Bisa menambahkan fitur peta interaktif online di layanan KRK dan menyiapkan dashboard pengawasan berbasis spasial agar monitoring bisa dilakukan lebih efisien meskipun SDM terbatas.

1.2 Realisasi Anggaran

3.2.1. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Anggaran

Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang, jumlah anggaran pada tahun 2024 sebesar 193.176.088.428,00 dan alokasi anggaran sebesar 173.774.677.847,79 sehingga terdapat prosentase penyerapan 89,96%. Adapun sisa anggaran sebesar 19.401.410.580,21 atau 10,04%.

Tabel 3.5
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program Tahun 2024

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja Daerah	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	71,27%	63,63%	89,28%	122.762.090.200	114.593.197.349,47	93,35%
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dalam kondisi mantap	73,89%	74,75%	101,16 %	109.678.590.200	103.370.341.761,11	94,25%
	Persentase Jembatan dalam kondisi standar baik	30,32%	30,32%	100,00 %	13.083.500.000,00	11.222.855.588,36	85,78%
Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	85,00%	96,68%	113,74 %	5.141.661.485,00	5.107.663.521,00	99,34%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	2.911.778.385,00	2.880.521.614,00	98,93%
PROGRAM PENATAGUNAN TANAH	Persentase bidang tanah yang menjadi data spasial yang di validasi	70,00%	70,87%	101,24 %	106.775.000,00	104.943.235,00	98,28%
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan yang di tindak lanjuti	100,00 %	100,00 %	100,00 %	2.123.108.100,00	2.122.198.672,00	99,96%
Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur bangunan gedung	Persentase bangunan gedung negara dan bangunan strategis yang telah memenuhi persyaratan teknis	100,00 %	100,00 %	100,00 %	24.617.889.593,00	14.664.754.693,07	59,57%

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja Daerah	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
	Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi kompetensi	100,00 %	100,00 %	100,00 %	975.545.472,00	954.717.399,90	97,86%
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung negara yang telah diverifikasi	100,00 %	100,00 %	100,00 %	24.517.926.323,00	14.566.297.693,07	59,41%
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN NYA	Persentase penataan bangunan dan lingkungan strategis	100,00 %	100,00 %	100,00 %	99.963.270,00	98.457.000,00	98,49%
PROGRAM PENGEMBANG AN JASA KONSTRUKSI	Persentase pelaku jasa konstruksi yang dibina	100,00 %	100,00 %	100,00 %	975.545.472,00	954.717.399,90	97,86%
Terwujudnya penyediaan air irigasi yang cukup	Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian	73,15%	73,15%	100,00 %	13.148.387.535,00	13.072.398.188,00	99,42%
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian	68,13%	70,81%	103,94 %	13.148.387.535,00	13.072.398.188,00	99,42%
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80,02%	77,31%	96,61%	26.530.514.143,00	25.381.946.696,35	95,67%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase Rata - rata Capaian Kinerja Aparatur	100,00 %	100,00 %	100,00 %	26.530.514.143,00	25.381.946.696,35	95,67%

Dari tabel diatas dapat di lihat, realisasi kinerja pada Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang Tahun 2024 telah mencapai 99,93%, sedangkan realisasi anggaran mencapai 89,96%.

1. Capaian Kinerja

Secara umum, capaian kinerja program tahun 2024 **sangat baik**:
Sebagian besar indikator mencapai diatas target, menandakan bahwa perencanaan kegiatan berjalan sesuai rencana bahkan melebihi target yang diharapkan. Adapun beberapa indikator yang

menunjukkan kinerja belum optimal yaitu antara lain pada sasaran:

- o **Kondisi jalan baik:** Capaian hanya **89,28%**

Faktor-faktor penghambat keberhasilan:

- Tingkat kerusakan jalan tidak sebanding dengan besaran anggaran
- Tonase kendaraan yang berlebihan sehingga mempercepat kerusakan jalan
- o **Evaluasi AKIP:** Capaian **96,61%**, masih di bawah target hal ini disebabkan sebagian SDM masih rendah dan perlu adanya monitoring berkala terhadap pemhaman, pengimplementasian SAKIP.

2.Realisasi Anggaran

Rata-rata serapan anggaran cukup tinggi ($\geq 95\%$) di banyak program. Adapun program yang menunjukkan rendahnya realisasi anggaran yaitu **Penataan Bangunan Gedung** dengan realisasi anggaran sebesar **59,57%**, adapun penyebab realisasi kinerja dan anggaran tersebut tidak dapat disandingkan karena terdapat kegiatan pembangunan pasar plosong yang merupakan mandatory dan tidak termasuk kedalam rancangan kinerja dinas PUPR dan tidak dapat diserap karena masih dalam kegiatan perencanaan yang masih dilaksanakan. Dari tabel diatas dapat dilihat, realisasi kinerja pada Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang Tahun 2024 telah mencapai 99,93%, sedangkan realisasi anggaran mencapai 89,96% Mayoritas program menunjukkan keseimbangan antara realisasi anggaran dan kinerja, mencerminkan perencanaan dan pelaksanaan yang baik. Adapun beberapa program memiliki kinerja tinggi namun realisasi anggaran rendah dan yang bisa menunjukkan efisiensi. Ketidaksesuaian antara capaian fisik dan anggaran akan menjadi fokus evaluasi untuk peningkatan mutu pengelolaan anggaran di tahun berikutnya pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang.

3.2.2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tabel dibawah ini dapat diketahui tingkat efisiensi pada tahun 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Tabel 3.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja Daerah	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	89,28%	93,35%	-4,07%
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dalam kondisi mantap	101,16%	94,25%	6,92%
	Persentase Jembatan dalam kondisi standar baik	100,00%	85,78%	14,22%
Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	113,74%	99,34%	14,40%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan	100,00%	98,93%	1,07%
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase bidang tanah yang menjadi data spasial yang di validasi	101,24%	98,28%	2,96%
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan yang di tindak lanjuti	100,00%	99,96%	0,04%

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja Daerah	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur bangunan gedung	Persentase bangunan gedung negara dan bangunan strategis yang telah memenuhi persyaratan teknis	100,00%	59,57%	40,43%
	Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi kompetensi	100,00%	97,86%	2,14%
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung negara yang telah diverifikasi	100,00%	59,41%	40,59%
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase penataan bangunan dan lingkungan strategis	100,00%	98,49%	1,51%
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pelaku jasa konstruksi yang dibina	100,00%	97,86%	2,14%
Terwujudnya penyediaan air irigasi yang cukup	Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian	100,00%	99,42%	0,58%
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian	103,94%	99,42%	4,51%
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah	96,61%	95,67%	0,94%

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja Daerah	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase Rata - rata Capaian Kinerja Aparatur	100,00%	95,67%	4,33%

Pada tabel diatas Secara keseluruhan, kinerja pada program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang telah tercapai, dengan penyerapan anggaran mencapai 89,96%. Efisiensi anggaran tahun 2024 sebesar 10,04%, yang merupakan nilai sisa kontrak. Sasaran strategis pada Bidang Sumber Daya Air adalah *“Terwujudnya penyediaan air yang cukup”* mencapai kinerja 100% dengan tingkat realisasi anggaran sebesar 99,42%. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran digunakan secara hampir penuh dan langsung berkontribusi terhadap pencapaian sasaran secara optimal. Tidak adanya deviasi antara target dan realisasi capaian menunjukkan efisiensi tinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.Sementara itu, program *“Pengelolaan Sumber Daya Air”* berhasil mencapai kinerja sebesar 103,94%, atau melampaui target, dengan tingkat realisasi anggaran yang sama, yaitu 99,42%. Capaian ini mencerminkan efisiensi yang sangat baik karena mampu menghasilkan output melebihi target dengan anggaran yang tidak melebihi pagu. Ini menandakan bahwa pemanfaatan sumber daya dilakukan secara efektif dan produktif. Kedua data tersebut mengindikasikan bahwa instansi telah mengelola sumber daya secara efisien, di mana output kinerja yang tinggi dicapai dengan anggaran yang digunakan secara optimal. Namun demikian, untuk penguatan akuntabilitas, penting dilakukan telaah lebih lanjut terhadap rincian kegiatan dan kontribusinya terhadap hasil akhir, guna memastikan bahwa capaian tersebut berdampak langsung terhadap peningkatan layanan publik, khususnya di bidang penyediaan air irigasi.

3.2.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia Tahun 2024

Tabel 3.7

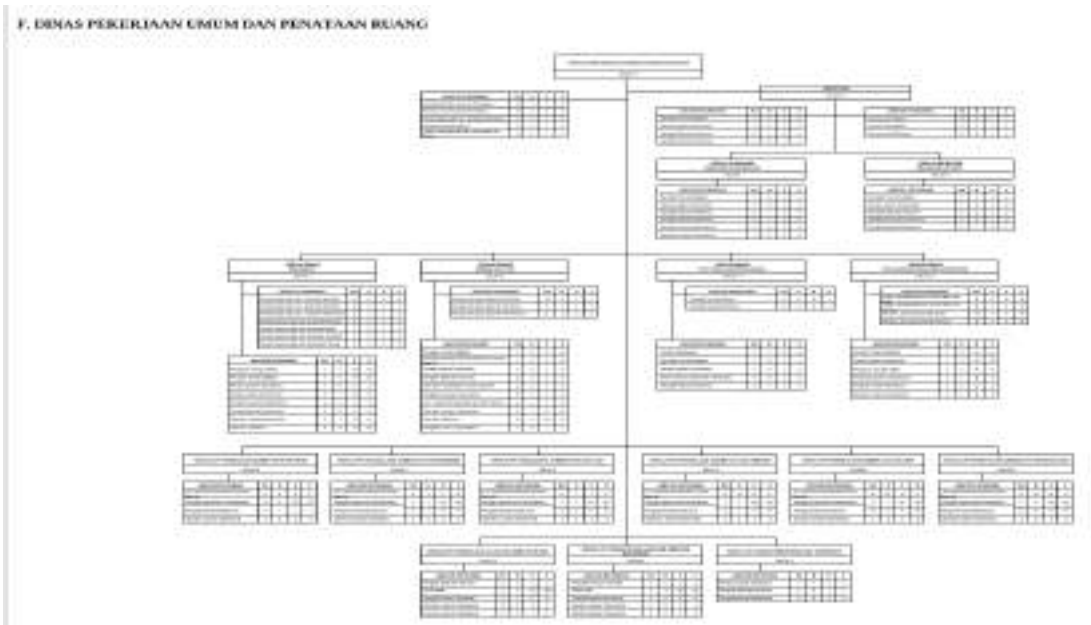
Efisiensi Sumber Daya Manusia Tahun 2024

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang

KINERJA TAHUN 2023			SUMBER DAYA MANUSIA			EFISIENSI SDM
TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	BEZETING PEGAWAI PER 31 DESEMBER 2024	KETERSEDIAAN SDM	% KETERSEDIAAN SDM	
100	100	100%	1265 Orang	104 Orang	8,22%	92,41% / EFISIEN
100	100	100%				
70	70.87	101,24%				
100	100	100%				
100	100	100%				
100	100	100%				
100	100	100%				
73.89	74.75	101.16%				
30.32	30.32	100%				
68.13	70.81	103.93%				
		100,63%			8,22%	

Berdasarkan tabel Efisiensi Sumber Daya Manusia Tahun 2024 diatas, dapat dilihat bahwa standar bezeting pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang Tahun 2024 adalah sebanyak 1.265 orang agar pelaksanaan pelayanan dapat berjalan secara optimal. Namun dalam prakteknya, hanya tersedia 104 orang dengan predikat kinerja pegawai ‘Baik’ sehingga kinerja tahun 2024 mendapatkan persentase capaian sebesar 100,63% dengan tingkat efisiensi sebesar 92,41%.

Bezeting pada tabel 3.15 Efisiensi Sumber Daya Manusia Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dihitung berdasarkan Analisa Jabatan dan Beban Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan kebutuhan pegawai sebanyak 1.265 pegawai dan ketersediaan pegawai ASN sebanyak 104 pegawai yang mendapatkan predikat kinerja ‘Baik’. Selain itu, dalam prakteknya terdapat tenaga pendukung (honorar) sebanyak 256 orang untuk lebih mengoptimalkan capaian kinerja. Hal ini dilakukan karena pegawai yang pensiun semakin meningkat sedangkan pengangkatan pegawai ASN baru sangat minim dilakukan yang mengakibatkan pegawai ASN semakin sedikit dengan target kinerja yang semakin meningkat sehingga dibutuhkan efisiensi yang tinggi untuk mencapai target kinerja dalam rangka mencukupi kekurangan SDM yang ada.



3.2.4. Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mempermudah kinerja aparatur/pegawai dilengkapi dengan sarana prasarana sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Berikut sarana prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang.

Tabel 3.8
Sarana dan Prasaran Penunjang Pekerjaan

No	Jenis	Unit	Kondisi		
			Baik	Sedang	Rusak
1	Kendaraan Roda 4 (empat):				
	- Mini Bus	7	7	-	-
	- Pick Up	15	12	-	3
2	Kendaraan Roda 2 (dua)	50	50		
3	Alat Berat:				
	- Dump Truck	2	2	-	-
	- Eskavator	8	8	-	-
	- Trailer	2	2	-	-
	-Wales Besar (6-8 ton)	7	5	1	1
	- Vibrating Roller	8	6	1	1
	- Truk Angkut	2	2	-	-
	- Truk Crane / Skylift	1	1	-	-
	- Telehandler	1	1	-	-

Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang Tahun 2024 ketersediaan sarana prasarana yaitu 98 unit dalam kondisi BAIK dan SEDANG, 5 unit dalam kondisi rusak dari total keseluruhan 103 unit. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa selama Tahun 2024 persentase ketersediaan sarana prasarana yang digunakan adalah sebesar 90,15% dari total standar kebutuhan dan diperlukan untuk dilakukukan penambahan sarana dan prasaranan sesuai dengan kebutuhan agar tetap optimal pada pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Meski belum banyak terekspos dalam pelaporan sebelumnya, Dinas PUPR perlu menunjukkan atau memperkuat langkah-langkah konkret berikut untuk menjawab kebutuhan efisiensi, baik dari sisi anggaran, SDM, maupun aset:

❖ **Aspek Anggaran: Diversifikasi Sumber Pendanaan**

- **Pemanfaatan CSR (Corporate Social Responsibility)** dari perusahaan-perusahaan lokal untuk mendukung perbaikan atau pembangunan prasarana lingkungan, seperti:
 - o Perbaikan saluran lingkungan di area industri
 - o Bantuan peralatan/material bangunan non-strategis
- **Skema kemitraan publik-swasta (PPP)** sederhana untuk proyek infrastruktur kecil seperti trotoar, taman median jalan, atau lampu penerangan.

Aspek SDM: Mobilisasi Masyarakat & Relawan Teknis

- **Kerja bakti terpadu** lintas wilayah dengan dukungan RT/RW, karang taruna, dan komunitas profesi teknik sipil untuk:
 - o Pemeliharaan ringan jalan lingkungan, saluran air, dan fasilitas umum.
 - o Edukasi teknis dasar kepada masyarakat agar mampu melakukan perbaikan awal secara mandiri.
- Pelibatan **mahasiswa teknik dari kampus lokal** untuk kegiatan magang terstruktur di bidang pengawasan, pemetaan, atau inspeksi lapangan.

Aspek Aset: Optimalisasi & Reuse

- **Inventarisasi ulang** dan rotasi alat berat antar-UPT agar tidak ada idle asset (aset menganggur) dan memastikan penggunaan maksimal.
- **Penggunaan kembali material bekas** hasil pembongkaran (paving bekas, batu, kayu, besi) untuk pemeliharaan ringan atau pekerjaan non-prioritas.
- Digitalisasi perencanaan aset melalui **GIS atau database aset terintegrasi**, untuk menghindari pengadaan ganda.

Evaluasi atas Tingginya Angka Efisiensi SDM (92,41%)

Angka efisiensi sebesar **92,41%** dalam aspek SDM menunjukkan selisih yang sangat besar antara jumlah SDM yang direncanakan dan yang terealisasi digunakan secara optimal.

Penjelasan Kemungkinan Masalah:

- **Kelebihan perencanaan kebutuhan pegawai** tanpa memperhitungkan efektivitas kerja, teknologi pendukung, atau integrasi digital (SIMBG, KRK online, dll).
- Kemungkinan **distribusi beban kerja tidak merata**, banyak pegawai administratif namun kekurangan petugas teknis lapangan atau pengawas bangunan.
- **Pergeseran beban kerja ke sistem digital** menyebabkan sebagian fungsi manual SDM menjadi tidak relevan lagi tanpa dilakukan reskilling.

Rekomendasi Langkah Korektif:

a. Audit Kebutuhan dan Pemetaan Beban Kerja

- Lakukan **evaluasi menyeluruh** atas **kebutuhan SDM aktual**, berbasis unit kerja, tugas pokok-fungsi, dan capaian kinerja.
- Gunakan metode **ABK (Analisis Beban Kerja)** dan evaluasi jabatan berbasis output, bukan hanya formasi.

b. Reskilling dan Realokasi SDM

- SDM administratif yang terdampak digitalisasi dialihkan fungsinya ke pengawasan, pendataan lapangan, atau analisis spasial.
- Latih SDM eksisting agar dapat mengisi **posisi teknis**, terutama pada sektor yang masih kekurangan (tata ruang, pengawasan fisik, irigasi, dll).

c. Pemanfaatan Outsourcing atau Tenaga Pendukung Temporer

- Untuk pekerjaan dengan fluktuasi musiman (banjir, puncak pemeliharaan jalan), gunakan **tenaga pendukung lepas** dibanding menambah pegawai tetap.

Kinerja akan semakin optimal jika efisiensi tidak hanya dikejar dari sisi serapan anggaran rendah, tetapi juga dari **penggunaan sumber daya secara produktif dan terukur**. Oleh karena itu,:

- **Efisiensi SDM di angka 92,41% bukanlah keberhasilan**, melainkan **indikator adanya ruang pemborosan atau perencanaan tidak presisi**.
- Dinas PUPR perlu menyusun rencana tindak lanjut untuk:
 - o Memperbaiki perencanaan SDM
 - o Mengoptimalkan peran SDM yang ada
 - o Menggali potensi kemitraan dan inovasi biaya rendah melalui kerja sama masyarakat dan swasta.

3.2.5. Upaya Perbaikan Kinerja

Sasaran Terwujudnya Penyediaan Air Yang Cukup upaya yang akan di lakukan untuk perbaikan kinerja pada tahun berikutnya yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas koordinasi yang intensif, baik koordinasi internal, koordinasi dengan dengan organisasi perangkat daerah tentang kendali, maupun koordinasi dengan instansi vertikal / instansi terkait;
- b. Meningkatkan produktifitas dan evisiensi kerja, responsivitas dan akuntabilitas kinerja;

- c. Meningkatkan kompetensi SDM bidang SDA dengan mengikuti pelatihan diantaranya, pelatihan SMK3, pelatihan pengawasan jaringan irigasi dan pelatihan petugas OP jaringan irigasi;
- d. Menambah alat penunjang kegiatan operasional (alat berat) untuk meningkatkan kinerja bidang SDA dalam pelayanan masyarakat terutama pada pekerjaan normalisasi saluran yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi dan fungsi jaringan irigasi.

Sasaran Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang upaya yang akan di lakukan untuk perbaikan kinerja pada tahun berikutnya yaitu:

- a. Menyusun rencana kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran;
- b. Pemantauan dan Evaluasi terhadap kemajuan pencapaian target kinerja beserta hambatannya yang dilakukan secara berkala dan kontinyu pada saat rapat koordinasi rutin;
- c. Meningkatkan komunikasi atau koordinasi dengan pihak ketiga, untuk pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga, perlu dikoordinasikan dan dikomunikasikan secara berkala terkait rencana kerja dan progres pekerjaan sehingga dapat dipastikan pekerjaan akan selesai sesuai target penyerapan anggaran yang telah direncanakan.

Sasaran Terwujudnya Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan upaya yang akan di lakukan untuk perbaikan kinerja pada tahun berikutnya yaitu:

- a. Percepatan proses pengadaan barang/jasa;
- b. Mempercepat identifikasi rencana kegiatan;
- c. Melakukan metode pengadaan barang/jasa melalui e purchasing (e-katalog).

Sasaran Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur upaya yang akan di lakukan untuk perbaikan kinerja pada tahun berikutnya yaitu:

- a. Meningkatkan pelayanan perizinan PBG dan SLF kepada masyarakat;
- b. Memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap kewajiban akan PBG dan SLF;
- c. Meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja konstruksi dengan memberikan pelatihan jasa konstruksi;
- d. Meningkatkan kualitas badan usaha jasa konstruksi dengan melakukan pembinaan jasa konstruksi;
- e. Meningkatkan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun lembaga swasta yang bergerak di bidang jasa konstruksi.

Sasaran Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah upaya yang akan di lakukan untuk perbaikan kinerja pada tahun berikutnya yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan yaitu mempersiapkan lebih awal terkait penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi tindak lanjut dari penilaian dan tindak lanjut SAKIP tahun sebelumnya;
- b. Meningkatkan monitoring kegiatan, tiap bulan untuk menjadi evaluasi tiap tribulan secara berkala;
- c. Mengajukan bimbingan teknis untuk menunjang peningkatan akuntabilitas kinerja.

Tindak lanjut hasil evaluasi merupakan salah satu sarana introspeksi dan koreksi dalam upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan capaian kualitas implementasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Meskipun dari hasil pelaporan dan analisis indikator sudah menunjukkan tingkat kemajuan, namun proses akuntabilitas kinerja masih lemah.

Kurangnya komitmen dalam mengedepankan akuntabilitas dari sisi kinerja sehingga akuntabilitas kinerja belum mendapat perhatian besar dan mengakibatkan terlambatnya proses penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja pada tahun berjalan. Keterbatasan kapabilitas SDM dibidang akuntabilitas kinerja menjadi salah satu penyebab lambatnya proses akuntabilitas kinerja pada unit kerja.

Sehingga evaluasi yang dilakukan secara berkala diharapkan dapat meningkatkan perbaikan akuntabilitas kinerja secara terus menerus dan hasilnya akan lebih baik dan bermanfaat.

BAB IV PENUTUP

Secara makro dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang pada tahun 2024 yang terdapat pada Tabel 3.1 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang, secara rata-rata capaian kinerja sebesar 99,93%.

Dalam rangka mempertahankan keberhasilan tersebut, dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang telah melakukan langkah langkah sebagai berikut :

- a. Pembentukan Tim Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang yang bertugas untuk melakukan monitoring secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali terhadap target dan realisasi indikator capaian kinerja;
- b. Mempertahankan kondisi jalan dengan melakukan kegiatan pemeliharaan rutin;
- c. Melaksanakan lelang awal tahun;
- d. Melaksanakan pengawasan pekerjaan konstruksi sesuai dengan spesifikasi pekerjaan;
- e. Mempertahankan kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku;
- f. Melaksanakan kerjasama yang intens dengan badan atau instansi yang berhubungan dengan pembinaan jasa konstruksi dan kebutuhan tenaga kerja yang bersertifikat dari penyedia jasa konstruksi;
- g. Pemenuhan kegiatan sesuai dengan SOP;
- h. Adanya koordinasi yang baik antara pengguna jasa (Dinas PUPR Kabupaten Jombang) dan penyedia jasa (Konsultan dan Kontraktor), dalam pelaksanaan perencanaan, kegiatan fisik dan pengawasan pekerjaan jaringan irigasi;
- i. Peningkatan kemampuan HIPPA/GHIPPA dalam melaksanakan sistem irigasi partisipatif supaya terjaga jaringan irigasi dalam kondisi baik;
- j. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan agar pada tahun 2024 sesuai dengan spesifikasi;
- k. Meningkatkan kemampuan petugas pengelola irigasi dalam melaksanakan pelayanan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang Tahun 2024 ini dibuat agar menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan maupun penetapan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang dimasa yang akan datang.

Jombang, Januari 2025
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Jombang


BAYU PANCOROADI ST. MT.
Pembina Tk. I
NIP. 197411092003121002



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 000.6.5.1/1490/415.18/2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BAYU PANCOROADI, S.T., M.T.**
Jabatan : **Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. Drs. Teguh Narutomo, MM., CRGP., CGCAE., CFrA.**
Jabatan : **Pj. Bupati Kabupaten Jombang**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jombang, 18 September 2024
PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Ditandatangani secara elektronik



BAYU PANCOROADI, ST., MT.
NIP. 197412092003121002

PIHAK KEDUA
Pj. Bupati Jombang
Ditandatangani secara elektronik

\$ttd2\$

Dr. Drs. TEGUH NARUTOMO, MM

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN JOMBANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	71,27 %
2.	Terwujudnya penyediaan air irigasi yang cukup	Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian	73,15 %
3.	Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur bangunan gedung	Persentase bangunan gedung negara dan bangunan strategis yang telah memenuhi persyaratan teknis	100,00 %
		Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi kompetensi	100,00 %
4.	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	85,00 %
5.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah	(A) 80,02 %

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1.	Tercapainya panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan, rehabilitasi, dan peningkatan (km)	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	73,89 %	122.762.090.200,00
	Tercapainya jembatan yang di rehabilitasi		Persentase panjang Jembatan dalam kondisi standar baik	30,32 %	
2.	Terkelolanya jaringan irigasi pada daerah irigasi kewenangan kabupaten	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian	68,13 %	13.148.387.535,00
3.	Terselenggaranya bangunan gedung negara yang telah diverifikasi	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung negara yang telah diverifikasi	100,00 %	21.517.926.323,00
NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
4.	Terselenggaranya penataan bangunan dan lingkungan strategis	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase penataan bangunan dan lingkungan strategis	100,00 %	99.963.270,00
5.	Terselenggaranya pembinaan pelaku jasa konstruksi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase pelaku jasa konstruksi yang dibina	100,00 %	975.545.472,00
6.	Terselenggaranya penataan ruang yang sesuai dengan ketentuan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan	100,00 %	2.911.778.385,00

			ketentuan		
7.	Terfasilitasinya permasalahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan yang di tindak lanjuti	100,00 %	2.123.108.100,00
8.	Tersedianya data aset tanah milik Pemda secara spasial untuk mendukung perencanaan tata ruang	Program Penatagunaan Tanah	Persentase bidang tanah yang menjadi data spasial yang di validasi	70,00 %	106.775.000,00
9.	Terlaksananya urusan penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Rata - rata Capaian Kinerja Aparatur	100,00 %	26.530.514.143,00
TOTAL ANGGARAN					190.176.088.428,00

Jombang, 18 September 2024
PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Ditandatangani secara elektronik



BAYU PANCORADI, ST., MT.
NIP. 197412092003121002

PIHAK KEDUA
Pj. Bupati Jombang

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Drs. TEGUH NARUTOMO, MM

RENCANA AKSI PERUBAHAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

- 1 NAMA : BAYU PANCORADI, ST., M.T
- 2 NIP : 197412092003121002
- 3 PANGKAT/GOL. RUANG : Pembina Tk.I (IV/b)
- 4 JABATAN : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 5 UNIT KERJA : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TRIBUNAL 1		TRIBUNAL 2		TRIBUNAL 3		TRIBUNAL 4		
			RENCANA AKSI	TARGET	RENCANA AKSI	TARGET	RENCANA AKSI	TARGET	RENCANA AKSI	TARGET	
1	Terlaksananya Urusan Pemungut Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Rata - rata Capaian Kinerja Aparatur	1	Menetapkan pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas PUPR	1 laporan	1	Menetapkan pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas PUPR	1 laporan	1	Menetapkan pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas PUPR	1 laporan
			2	Koordinasi dan evaluasi perencanaan serta capaian kinerja	1 laporan	2	Koordinasi dan evaluasi perencanaan serta capaian kinerja	2 laporan	2	Koordinasi dan evaluasi perencanaan serta capaian kinerja	2 laporan
			3	Koordinasi terkait tercapainya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai; Koordinasi terkait tercapainya dokumen laporan keuangan perangkat daerah dan Koordinasi terkait tersusunya pelaporan aset yang sesuai dengan aturan	1 laporan	3	Koordinasi terkait tercapainya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai; Koordinasi terkait tercapainya dokumen laporan keuangan perangkat daerah dan Koordinasi terkait tersusunya pelaporan aset yang sesuai dengan aturan	1 laporan	3	Koordinasi terkait tercapainya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai; Koordinasi terkait tercapainya dokumen laporan keuangan perangkat daerah dan Koordinasi terkait tersusunya pelaporan aset yang sesuai dengan aturan	1 laporan
2	Terselenggaranya bangunan gedung negara yang telah diverifikasi	Persentase bangunan gedung negara yang telah diverifikasi	1	Validasi rekam PBG dan SLP	100%	1	Validasi rekam PBG dan SLP	100%	1	Validasi rekam PBG dan SLP	100%
3	Terselenggaranya penataan bangunan dan lingkungan strategis	Persentase penataan bangunan dan lingkungan strategis	1	Mengeluarkan SK kepala dinas tentang HSBGN	1 Laporan	1	Mengeluarkan SK kepala dinas tentang HSBGN	1 Laporan	1	Mengeluarkan SK kepala dinas tentang HSBGN	1 Laporan
4	Terselenggaranya pembinaan pelaku jasa konstruksi	Persentase pelaku jasa konstruksi yang dibina	1	Mengevaluasi pelaksanaan pelatihan tenaga terampil	1 Laporan	-	-	-	-	-	-
			2	Validasi hasil evaluasi Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK)	1 Laporan	-	-	-	-	-	-

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TRIBUNAL 1		TRIBUNAL 2		TRIBUNAL 3		TRIBUNAL 4	
			RENCANA AKSI	TARGET	RENCANA AKSI	TARGET	RENCANA AKSI	TARGET	RENCANA AKSI	TARGET
5	Terselenggaranya Pemetaan Ruang Yang Sesuai Dengan Ketentuan	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan	1	Monitoring dan evaluasi fasilitas rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan	1	Monitoring dan evaluasi fasilitas rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan	1	Monitoring dan evaluasi fasilitas rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan	1	Monitoring dan evaluasi fasilitas rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan
			2	Melaksanakan rapat koordinasi atas layanan permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang	2	Melaksanakan rapat koordinasi atas layanan permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang	2	Melaksanakan rapat koordinasi atas layanan permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang	2	Melaksanakan rapat koordinasi atas layanan permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang
6	Tersedianya Data Aset Tanah Milik Pemda Secara Spasial untuk Mendukung Perencanaan Tata Ruang	Persentase bidang tanah yang menjadi data spasial yang di validasi	1	Validasi aset tanah milik pemda secara spasial	1	Validasi aset tanah milik pemda secara spasial	1	Validasi aset tanah milik pemda secara spasial	1	Validasi aset tanah milik pemda secara spasial
7	Terselenggaranya Pemusatan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan	Persentase Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan yang di tindak lanjut	1	Monitoring dan evaluasi fasilitas sengketa, konflik dan perkara pertanahan	1	Monitoring dan evaluasi fasilitas sengketa, konflik dan perkara pertanahan	1	Monitoring dan evaluasi fasilitas sengketa, konflik dan perkara pertanahan	1	Monitoring dan evaluasi fasilitas sengketa, konflik dan perkara pertanahan
8	Terselenggaranya Jaringan Irigasi Pada Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten	Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian	1	Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembagian air irigasi melalui dokumen O dan P dari masing - masing UPT	1	Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembagian air irigasi melalui dokumen O dan P dari masing - masing UPT	1	Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembagian air irigasi melalui dokumen O dan P dari masing - masing UPT	1	Melaksanakan dokumen RTTU
9	Tercapainya Panjang Jalan Yang Dilakukan Pemeliharaan, Rehabilitasi dan Peningkatan (km)	Persentase jalan dalam kondisi mantap	1	Koordinasi perencanaan kegiatan jalan tahun n+1	1	Koordinasi terkait usulan kegiatan jalan	1	Supervisi / evaluasi kegiatan jalan	1	Supervisi / evaluasi kegiatan jalan
10	Tercapainya Jembatan Yang di Rehabilitasi	Persentase panjang Jembatan dalam kondisi standar baik	1	Koordinasi perencanaan kegiatan jembatan tahun n+1	1	Koordinasi terkait usulan kegiatan jembatan	1	Supervisi / evaluasi kegiatan jembatan	1	Supervisi / evaluasi kegiatan jembatan

Atasan Langsung

Dr. Drs. Teguh Narutomo M.M

Jombang, 26 Agustus 2024
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Pembinaan Ruang


BAYU PANJI PRADI, ST., MT.
NIP. 19741209000121002

**MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
TRIBUNAL 1 TAHUN 2024**

1 NAMA : BAYU PANCORoadI, ST., M.T
2 NIP : 197412092003121002
3 PANGKAT/GOL. RUANG : Pembina Tk.I (IV/b)
4 JABATAN : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5 UNIT KERJA : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI PENDUKUNG	
1	Terlaksananya Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Rata - rata Capaian Kinerja Aparatur	1	Menetapkan pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas PUPR	1 laporan	1 laporan	100,00%	Tersusunnya pemenuhan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas PUPR sesuai dengan rencana	Melaksanakan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas PUPR	1	Anggaran Kas dan Realisasi Anggaran
			2	Koordinasi dan evaluasi perencanaan serta capaian kinerja	1 laporan	1 laporan	100,00%	1 Tersusunnya laporan perencanaan dan capaian kinerja sesuai dengan target yang telah di tetapkan	Optimalisasi Kegiatan perencanaan dan capaian kinerja dengan target yang telah di tetapkan	1	Berita Acara Evaluasi Internal Tribunal I
			3	Koordinasi terkait tercapainya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai; Koordinasi terkait tercapainya dokumen laporan keuangan perangkat daerah dan Koordinasi terkait tersusunnya pelaporan aset yang sesuai dengan aturan	1 laporan	1 laporan	100,00%	1 Tercapainya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai; tercapainya dokumen laporan keuangan tribulan I; dan Tersusunnya pelaporan aset yang sesuai dengan aturan	Melaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai,menyusun dokumen laporan keuangan tribulan I dan menyusun pelaporan aset yang sesuai aturan	1	Daftar gaji dan tunjangan ASN tiap bulan dan Laporan keuangan tribulan I
2	Terselenggaranya bangunan gedung negara yang telah diverifikasi	Persentase bangunan gedung negara yang telah diverifikasi	1	Validasi rekom PBG dan SLF	100%	100%	100,00%	1 Proses pencairan	Akan dilaksanakan sesuai dengan rencana	1	Laporan Data PBG
3	Terselenggaranya penataan bangunan dan lingkungan strategis	Persentase penataan bangunan dan lingkungan strategis	1	Mengeluarkan SK kepala dinas tentang HSBGN	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Anggaran terserap sesuai target	Akan dilaksanakan sesuai dengan rencana	1	Laporan SHST
4	Terselenggaranya pembinaan pelaku jasa konstruksi	Persentase pelaku jasa konstruksi yang dibina	1	Mengevaluasi pelaksanaan pelatihan tenaga terampil	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Anggaran terserap sesuai target	Telah dilakukan pelatihan tenaga terampil konstruksi dengan realisasi 30 orang	1	Data isian aplikasi SIJAKI
			2	Validasi hasil evaluasi Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK)	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	2 Anggaran terserap sesuai target	Telah dilakukan pembinaan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi dengan realisasi 50 lembaga	2	Laporan Data Badan Usaha, Dokumentasi

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI PENDUKUNG	
5	Terselenggaranya Penataan Ruang Yang Sesuai Dengan Ketentuan	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan	1	Monitoring dan evaluasi fasilitasi rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Melaporkan hasil monev fasilitasi rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan	Menerbitkan rekomendasi pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan	1	Laporan Monev Pemanfaatan Ruang Tahun 2024 Tribunal I
			2	Melaksanakan rapat koordinasi atas layanan permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	2 Melaksanakan rapat koordinasi penilaian terhadap permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang dengan Forum Penataan Ruang Daerah	Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dalam Berita Acara Pembahasan Penilaian KKPR	2	Daftar Berita Acara Rapat Koordinasi Penilaian KKPR dengan Tim Forum Penataan Ruang Daerah
6	Tersedianya Data Aset Tanah Milik Pemda Secara Spasial untuk Mendukung Perencanaan Tata Ruang	Persentase bidang tanah yang menjadi data spasial yang di validasi	1	Validasi aset tanah milik pemda secara spasial	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Melakukan validasi terhadap hasil pendataan aset tanah milik pemda secara spasial	Koordinasi dengan BPN dan BPKAD dalam rangka pensertipikatan aset tanah milik pemda	1	Laporan Updating Pendataan Aset Tanah milik Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan Bareng dan Wonosalam
7	Terfasilitasinya Permasalahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan	Persentase Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan yang di tindak lanjuti	1	Monitoring dan evaluasi fasilitasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Melaporkan hasil monev terhadap pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan	Menindaklanjuti hasil monev terhadap pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan	1	Daftar fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan
8	Terkelolanya Jaringan Irigasi Pada Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten	Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian	1	Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembagian air irigasi melalui dokumen O dan P dari masing - masing UPT	6 dokumen	6 dokumen	100,00%	1 Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RTTG pada MT 1	Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RTTG pada MT 1	1	Tabel realisasi debit
9	Tercapainya Panjang Jalan Yang Dilakukan Pemeliharaan, Rehabilitasi dan Peningkatan (km)	Persentase jalan dalam kondisi mantap	1	Koordinasi perencanaan kegiatan jalan tahun n+1	1 laporan	1 laporan	100,00%	1 Terlaksananya kegiatan pengadaan jasa pekerjaan perencanaan teknis jalan	Optimalisasi Kegiatan	1	Dokumen kontrak perencanaan teknis kegiatan Rekonstruksi, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Berkala Jalan
10	Tercapainya Jembatan Yang di Rehabilitasi	Persentase panjang Jembatan dalam kondisi standar baik	1	Koordinasi perencanaan kegiatan jembatan tahun n+1	1 laporan	1 laporan	100,00%	1 Terlaksananya kegiatan pengadaan jasa pekerjaan perencanaan teknis jembatan	Optimalisasi Kegiatan	1	Dokumen kontrak perencanaan teknis kegiatan Rehabilitasi Jembatan
RATA-RATA CAPAIAN											

Atasan Langsung

Pj. SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T

Jombang, 28 Maret 2024
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

BAYU PANCOROADI, ST., M.T. NIP.197412092003121002

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
TRIBUNAL I TAHUN 2024

1. NAMA : BAYU PANCORADI, ST., M.T
2. NIP : 197412092003121002
3. PANGKAT/GOL. RUANG : Pembina Tk.I (IV/b)
4. JABATAN : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. UNIT KERJA : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KINERJA	DIKATOR KINERJA INDIVI	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MOREV	TINDAK LANJUT	BUKTI PENDUKUNG
1	Terlaksananya Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Rata - rata Capaian Kinerja Aparatur	1 Menetapkan pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas PUPR	1 laporan	1 laporan	100,00%	1 Tersusunnya pemenuhan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas PUPR sesuai dengan rencana	1 Melaksanakan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas PUPR	1 Anggaran Kas dan Realisasi Anggaran
			2 Koordinasi dan evaluasi perencanaan serta capaian kinerja	2 laporan	2 laporan	100,00%	1 Tersusunnya laporan perencanaan dan capaian kinerja	1 Optimalisasi kegiatan perencanaan dan capaian kinerja	1 Berita Acara Evaluasi Internal Tribunal II
			3 Koordinasi terkait tercapainya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai; Koordinasi terkait tercapainya dokumen laporan keuangan peringkat daerah dan Koordinasi terkait tersusunnya pelaporan aset yang sesuai dengan aturan	1 laporan	1 laporan	100,00%	1 Tercapainya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai; tercapainya dokumen laporan keuangan tribunal II, Semester I; dan Tersusunnya pelaporan aset yang sesuai dengan aturan	1 Melaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai; menyusun dokumen laporan keuangan tribunal II, Semester I dan menyusun pelaporan aset yang sesuai aturan	1 Daftar gaji dan tunjangan ASN tiap bulan dan Laporan keuangan tribunal II dan semester I
2	Terselenggaranya bangunan gedung negara yang telah diverifikasi	Persentase bangunan gedung negara yang telah diverifikasi	1 Validasi rekam PBG dan SLP	100%	100%	100,00%	1 Terlaksananya rekam PBG dan SLP	1 Sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana	1 Laporan Data PBG
3	Terselenggaranya penataan bangunan dan lingkungan strategis	Persentase penataan bangunan dan lingkungan strategis	1 Menghbitkan SK kepala dinas tentang HSBGN	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Tersusunnya laporan SHST	1 Sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana	1 Laporan SHST
4	Terselenggaranya pembinaan pelaku jasa konstruksi	Persentase pelaku jasa konstruksi yang dibina	1 -	-	-	-	1 -	-	-
			2 -	-	-	-	2 -	-	-

NO	KINERJA	DIKATOR KINERJA INDIVI	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI PENDUKUNG
5	Terselenggaranya Penataan Ruang Yang Sesuai Dengan Ketentuan	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan	1 Monitoring dan evaluasi fasilitas rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Melaporkan hasil moner fasilitas rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan	Menerbitkan rekomendasi pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan	1 Laporan Moner Pemanfaatan Ruang Tahun 2024 Tribunal II
			2 Melaksanakan rapat koordinasi atas layanan permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	2 Melaksanakan rapat koordinasi penelaian terhadap permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang dengan Forum Penataan Ruang Daerah	Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dalam Berita Acara Pembahasan Penilaian KKPR	2 Daftar Berita Acara Rapat Koordinasi Penilaian KKPR dengan Tim Forum Penataan Ruang Daerah
6	Tersedianya Data Aset Tanah Milik Penda Secara Spasial untuk Mendukung Perencanaan Tata Ruang	Persentase bidang tanah yang menjadi data spasial yang di validasi	1 Validasi aset tanah milik penda secara spasial	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Melakukan validasi terhadap hasil pendataan aset tanah milik penda secara spasial	Koordinasi dengan BPN dan BPEAD dalam rangka persertipkatan aset tanah milik penda	1 Laporan Updating Pendataan Aset Tanah milik Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan Barong dan Wonoalam
7	Terfasilitasinya Permasalahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan	Persentase Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan yang di tindak lanjuti	1 Monitoring dan evaluasi fasilitas sengketa, konflik dan perkara pertanahan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Melaporkan hasil moner terhadap pelaksanaan fasilitas penyelesaian permasalahan pertanahan	Menindaklanjuti hasil moner terhadap pelaksanaan fasilitas penyelesaian permasalahan pertanahan	1 Daftar fasilitas penyelesaian permasalahan pertanahan
8	Terkelolanya Jaringan Irigasi Pada Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten	Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian	1 Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembagian air irigasi melalui dokumen Q dan P dari masing - masing UPT	6 dokumen	6 dokumen	100,00%	1 Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RTTG pada MT 2	Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RTTG pada MT 2	1 Tabel realisasi debit
9	Tercapainya Panjang Jalan Yang Dilakukan Pemeliharaan, Rehabilitasi dan Peningkatan (km)	Persentase jalan dalam kondisi mantap	1 Koordinasi terkait usulan kegiatan jalan	1 laporan	1 laporan	100,00%	1 Tersusunnya daftar usulan kegiatan jalan	Optimalisasi Kegiatan	1 Daftar usulan kegiatan jalan P-APBD 2024
10	Tercapainya Jembatan Yang di Rehabilitasi	Persentase panjang Jembatan dalam kondisi standar baik	1 Koordinasi terkait usulan kegiatan jembatan	1 laporan	1 laporan	100,00%	1 Tersusunnya daftar usulan kegiatan jembatan	Optimalisasi Kegiatan	1 Daftar usulan kegiatan jembatan P-APBD 2025
RATA-RATA CAPAIAN						100,00%			

Atasan Langsung

Pj. SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T

Jombang, 28 Juni 2024
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


BAYU PUNCORO, ST., M.T
NIP.197412092003121002

**MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
TRIBUNAL III TAHUN 2024**

1 NAMA : BAYU PANCORADI, ST., M.T
2 NIP : 197412092003121002
3 PANGKAT/GOL. RUANG : Pembina Tk.I (IV/b)
4 JABATAN : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5 UNIT KERJA : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEY	TINDAK LANJUT	BUKTI PENDUKUNG
1	Terlaksananya Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Rata - rata Capaian Kinerja Aparatur	1 Menetapkan pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas PUPR	1 laporan	1 laporan	100,00%	1 Tersusunnya pemenuhan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas PUPR sesuai dengan rencana	Melaksanakan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas PUPR	1 Anggaran Kas dan Realisasi Anggaran
			2 Koordinasi dan evaluasi perencanaan serta capaian kinerja	2 laporan	2 laporan	100,00%	1 Tersusunnya laporan perencanaan dan capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan	Optimalisasi Kegiatan perencanaan dan capaian kinerja dengan target yang telah ditetapkan	1 Berita Acara Evaluasi Internal Tribunal III
			3 Koordinasi terkait tercapainya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai; Koordinasi terkait tercapainya dokumen laporan keuangan perangkat daerah dan Koordinasi terkait tersusunnya pelaporan aset yang sesuai dengan aturan	1 laporan	1 laporan	100,00%	1 Tercapainya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai; tercapainya dokumen laporan keuangan tribunal III; dan Tersusunnya pelaporan aset yang sesuai dengan aturan	Melaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai; menyusun dokumen laporan keuangan tribunal III dan menyusun pelaporan aset yang sesuai aturan	1 Daftar gaji dan tunjangan ASN tiap bulan dan Laporan keuangan tribunal III
2	Terselenggaranya bangunan gedung negara yang telah diverifikasi	Persentase bangunan gedung negara yang telah diverifikasi	1 Validasi rekam PDB dan SLF	100%	100%	100,00%	1 Terlaksananya rekam PDB dan SLF	Sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana	1 Laporan Data PDB
3	Terselenggaranya penataan bangunan dan lingkungan strategis	Persentase penataan bangunan dan lingkungan strategis	1 Mengeluarkan SK kepala dinas tentang HSBCN	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Tersusunnya laporan HST	Sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana	1 Laporan SHST

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
TRIBUNAL IV TAHUN 2024

1 NAMA : BAYU PANCORODI, ST., M.T
 2 NIP : 197412092003121002
 3 PANGKAT/GOL. RUANG : Pembina Tk.I (IV/b)
 4 JABATAN : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 5 UNIT KERJA : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI PENDUKUNG
1	Terlaksananya Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Rata - rata Capaian Kinerja Aparatur	1 Menetapkan pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas PUPR	1 laporan	1 laporan	100,00%	1 Tersusunnya pemenuhan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas PUPR sesuai dengan rencana	Melaksanakan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas PUPR	1 Anggaran Kas dan Realisasi Anggaran
			2 Koordinasi dan evaluasi perencanaan serta capaian kinerja	2 laporan	2 laporan	100,00%	1 Tersusunnya laporan perencanaan dan capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan	Optimalisasi Kegiatan perencanaan dan capaian kinerja dengan target yang telah ditetapkan	1 Berita Acara Evaluasi Internal Tribunal IV
			3 Koordinasi terkait tercapainya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai; Koordinasi terkait tercapainya dokumen laporan keuangan perangkat daerah dan Koordinasi terkait tersusunnya pelaporan aset yang sesuai dengan aturan	1 laporan	1 laporan	100,00%	1 Tercapainya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai; tercapainya dokumen laporan keuangan tribunal IV; dan Tersusunnya pelaporan aset yang sesuai dengan aturan	Melaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai; menyusun dokumen laporan keuangan tribunal IV dan menyusun pelaporan aset yang sesuai aturan	1 Daftar gaji dan tunjangan ASN tiap bulan dan Laporan keuangan tribunal IV
2	Terselenggaranya bangunan gedung negara yang telah diverifikasi	Persentase bangunan gedung negara yang telah diverifikasi	1 Validasi rekam PBG dan SLF	100%	100%	100,00%	1 Terlaksananya rekam PBG dan SLF	Sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana	1 Laporan Data PBG
3	Terselenggaranya penataan bangunan dan lingkungan strategis	Persentase penataan bangunan dan lingkungan strategis	1 Mengeluarkan SK kepala dinas tentang HSBGN	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Tersusunnya laporan HST	Sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana	1 Laporan SHST

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEY	TINDAK LANJUT	BUKTI PENDUKUNG				
5	Terwujudnya Penataan Ruang Yang Sesuai Dengan Ketentuan	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan	1	Monitoring dan evaluasi fasilitas rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1	Melaporkan hasil moneyev fasilitas rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan	1	Laporan Moneyev Pemanfaatan Ruang Tahun 2024 Triwulan IV		
			2	Melaksanakan rapat koordinasi atas lajuran pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	2	Melaksanakan rapat koordinasi penilaian terhadap permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang dengan Forum Penataan Ruang Daerah	2	Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dalam Berita Acara Pembahasan Penilaian KKPR	2	Daftar Berita Acara Rapat Koordinasi Penilaian KKPR dengan Tim Forum Penataan Ruang Daerah
6	Terwujudnya Data Aset Tanah Milik Pemda Secara Spasial untuk Mendukung Perencanaan Tata Ruang	Persentase bidang tanah yang menjadi data spasial yang di validasi	1	Validasi aset tanah milik pemda secara spasial	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1	Melakukan validasi terhadap hasil pendataan aset tanah milik pemda secara spasial	1	Koordinasi dengan BPN dan BPKAD dalam rangka penertipkatan aset tanah milik pemda	1	Laporan Updating Pendataan Aset Tanah milik Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan Sareng dan Wonosalam
7	Terfasilitasinya Permasalahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan	Persentase Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan yang di tindak lanjut	1	Monitoring dan evaluasi fasilitas sengketa, konflik dan perkara pertanahan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1	Melaporkan hasil moneyev terhadap pelaksanaan fasilitas penyelesaian permasalahan pertanahan	1	Menindaklanjuti hasil moneyev terhadap pelaksanaan fasilitas penyelesaian permasalahan pertanahan	1	Daftar fasilitas penyelesaian permasalahan pertanahan
8	Terkelolanya Jaringan Irigasi Pada Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten	Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian	1	Menghasilkan dokumen RTTG	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1	Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RTTG pada MT 3	1	Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RTTG pada MT 3	1	Tabel realisasi debit
9	Tercapainya Panjang Jalan Yang Dilakukan Pemeliharaan, Rehabilitasi dan Peningkatan (km)	Persentase jalan dalam kondisi mantap	1	Supervisi / evaluasi kegiatan jalan	1 laporan	1 laporan	100,00%	1	Tersusunnya daftar hasil PI Triwulan IV kegiatan jalan Tahun Anggaran 2024	1	Optimalisasi Kegiatan	1	Daftar hasil PI Triwulan IV kegiatan jalan Tahun Anggaran 2024
10	Tercapainya Jembatan Yang di Rehabilitasi	Persentase panjang Jembatan dalam kondisi standar baik	1	Supervisi / evaluasi kegiatan jembatan	1 laporan	1 laporan	100,00%	1	Tersusunnya daftar hasil PI Triwulan IV kegiatan jembatan Tahun Anggaran 2024	1	Optimalisasi Kegiatan	1	Daftar hasil PI Triwulan IV kegiatan jembatan Tahun Anggaran 2024
RATA-RATA CAPAIAN							100,00%						

Atasan Langsung

Dr. Drs. Teguh Nurutomo M.M

Jombang, 31 Desember 2024
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

BAYU PANGROHADI, ST., MT
NIP.197412092003121002

**EVALUASI KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF**

PERIODE: Penilaian SKP 1 Tahun

PEMERINTAH KAB. JOMBANG

PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2024

NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	BAYU PANCORoadI, ST, MT	1	NAMA	TEGUH NARUTOMO
2	NIP	197412092003121002	2	NIP	-
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b	3	PANGKAT/ GOL. RUANG	
4	JABATAN	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4	JABATAN	Pj. Bupati Jombang
5	UNIT KERJA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5	UNIT KERJA	Pemerintah Kabupaten Jombang

**CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
BAIK**

POLA DISTRIBUSI:

HASIL KERJA

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

UTAMA

1	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	71,27 %	Penerima Layanan	63,63% berdasarkan DAFTAR HASIL PENYERAHAN PERTAMA PEKERJAAN KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN TAHUN ANGGARAN 2024	Pimpinan: 📌
2	Terwujudnya penyediaan air irigasi yang cukup	Persentase kecukupan air irigasi terhadap luas areal pertanian	73,15 %	Proses Bisnis	73,15% berdasarkan Rekapitulasi Debit Rencana dan Realisasi Harian Daerah Irigasi Dinas PUPR Kab. Jombang tahun 2024	Pimpinan: 📌
3	Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur bangunan gedung	Persentase bangunan gedung negara dan bangunan strategis yang telah memenuhi persyaratan teknis	100,00 %	Proses Bisnis	100% berdasarkan rekapitulasi proses PBG dan SHST Tahun 2024	Pimpinan: 📌

HASIL KERJA						
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi kompetensi	100,00%	Penerima Layanan	100% berdasarkan Bukti Kontrak Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah KabupatenKota (Penyusunan Dokumen Pengawasan Jasa Konstruksi dan Pengembangan Aplikasi SIJAKI)	Pimpinan: 🟢
4	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	85,00 %	Penerima Layanan	96,68% berdasarkan Laporan Monev Pemanfaatan Ruang Tahun 2024	Pimpinan: 🟢
5	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah	(A) 80,02 %	Penguatan Internal	77,31% berdasarkan Berita Acara Evaluasi Internal TB 4 2024 Dinas PUPR	Pimpinan: 🟢
6	Terlaksananya pengelolaan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang	Persentase pengelolaan keuangan (anggaran) Dinas PUPR	80%	Anggaran	89,95% berdasarkan Laporan Realisasi APBD tahun 2024	Pimpinan: 🟢
7	Terlaksananya direktif pimpinan sesuai ekspektasi pimpinan	Persentase penyelesaian penugasan direktif pimpinan sesuai target waktu yag ditetapkan	100%	Penerima Layanan	100% berdasarkan Surat Perintah Tugas Pimpinan Tahun 2024	Pimpinan: 🟢
TAMBAHAN						
RATING HASIL KERJA SESUAI EKSPEKTASI						
PERILAKU KERJA						UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
1	Berorientasi Pelayanan					Pimpinan: 🟢
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti		Ekspektasi Khusus Pimpinan: ramah dan solutif dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan mampu memberikan solusi atas permasalahan tersebut			
2	Akuntabel					

PERILAKU KERJA			UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
	- Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjadi role model/panutan dalam menunjang komitmen dan integritas pegawai di lingkungan kerjanya	Pimpinan: 🍌
3	Kompeten		
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersedia untuk mengajarkan atau ketrampilan yang dimiliki/ kepada orang lain . - Menyelesaikan setiap pekerjaan sesuai dengan target dan standart kualitas yang ditetapkan	Pimpinan: 🍌
4	Harmonis		
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Membangun komunikasi yang lebih terbuka dan menjaga hubungan baik dengan stakeholder	Pimpinan: 🍌
5	Loyal		
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berani menyampaikan adanya indikasi/ hal-hal yang dapat merugikan dan membahayakan Negara	Pimpinan: 🍌
6	Adaptif		
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: dapat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, mengikuti perubahan peraturan perundangan yang berlaku dan bertindak proaktif atas perubahan peraturan perundang yang terkait dengan tupoksi	Pimpinan: 🍌
7	Kolaboratif		
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dalam penyelesaian masalah, berpikiran terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah serta dapat menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Pimpinan: 🍌

RATING PERILAKU KERJA SESUAI EKSPEKTASI
PREDIKAT KINERJA PEGAWAI BAIK

Pegawai yang Dinilai



BAYU PANCOROADI, ST, MT
197412092003121002

Jombang, 23 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja



TEGUH NARUTOMO



DOKUMEN EVALUASI KINERJA PEGAWAI

PERIODE : PENILAIAN SKP 1 TAHUN

PEMERINTAH KAB. JOMBANG PERIODE PENILAIAN:
1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2024

1.	PEGAWAI YANG DINILAI
	NAMA : BAYU PANCOROADI, ST, MT
	NIP : 197412092003121002
	PANGKAT/GOL RUANG : Pembina Tingkat I / IV/b
	JABATAN : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	UNIT KERJA : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.	PEJABAT PENILAI KINERJA
	NAMA : TEGUH NARUTOMO
	NIP : -
	PANGKAT/GOL RUANG :
	JABATAN : Pj. Bupati Jombang
	UNIT KERJA : Pemerintah Kabupaten Jombang
3.	ATASAN PEJABAT PENILAI KINERJA
	NAMA :
	NIP :
	PANGKAT/GOL RUANG :
	JABATAN :
	UNIT KERJA :
4.	EVALUASI KINERJA
	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI : BAIK
	PREDIKAT KINERJA PEGAWAI : BAIK
5.	CATATAN/REKOMENDASI

Jombang, 23 Januari 2025
7. Pegawai yang Dinilai

BAYU PANCOROADI, ST, MT
197412092003121002

Jombang, 23 Januari 2025
6. Pejabat Penilai Kinerja

TEGUH NARUTOMO

